

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY*
PT PERTAMINA RU II DUMAI TERHADAP KELOMPOK NELAYAN
TUNA (STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG
MINAPOLITAN DI KELURAHAN TANJUNG PALAS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

WINDA FEBRIANA
NPM: 187110344

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Winda Febriana
NPM : 187110344
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility*
PT Pertamina RU-II Dumai terhadap Kelompok
Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan
Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 11 April 2022

Turut menyetujui,
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si

Dosen Pembimbing



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Winda Febriana
Npm : 187110344
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility*
PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok
Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan
Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si

Anggota,



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0320/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Winda Febriana
N P M : 187110344
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility PT Pertamina RU II Dumai Terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan Dikelurahan Tanjung Palas)

Struktur Tim :

1. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andri Kurniawan, B.P.M., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2022
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

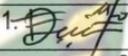
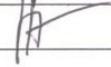
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0320/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 20 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 21 April 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian kmprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Winda Febriana
NPM : 187110344
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Corporate Social Responcibility PT Pertamina RU II Dumai Terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan Dikelurahan Tanjung Palas)
Nilai Ujian : Angka : "82.06" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 21 April 2022

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Winda Febriana
Npm : 187110344
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility*
PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok
Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan
Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si



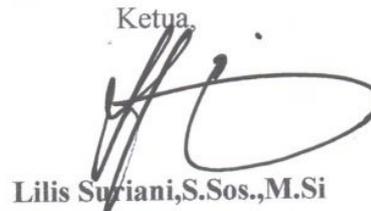
Herman, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra safri, S.Sos., M.Si

Turut menyetujui,
Prodi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho dan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau .
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
6. Seluruh Narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi serta data untuk penelitian penulis.
7. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa mengiringi dengan doa, nasehat dan dukungan serta memberikan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis yaitu Alfia Umaira Azzani, Ainil Aziza, Siti Marwah, Sri Wahyuni Sapitri, dan Anang Sanubari yang telah membantu baik moril maupun materil, dan senantiasa memberikan motivasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap ini bermanfaat bagi semua pihak. Segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya.

Pekanbaru, 14 Maret 2022
Penulis,

Winda Febriana
NPM : 187110344

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
2.1 Studi Kepustakaan	20
2.1.1 Konsep Administrasi	20
2.1.2 Konsep Organisasi	24
2.1.3 Konsep Manajemen	27
2.1.4 Konsep <i>Corporate Social Responcibility</i>	30
2.1.5 Konsep CSR dan Pemberdayaan Masyarakat	40
2.1.6 Konsep Pelaksanaan	44
2.1.7 Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik	45
2.1.8 Konsep Implementasi Kebijakan publik	50
2.1.9 Konsep Pembangunan Keberlanjutan	54
2.2 Penelitian Terdahulu	57
2.3 Kerangka Pikir	64
2.4 Konsep Operasional	65
2.5 Operasional Variabel	69
BAB III : METODE PENELITIAN	71
3.1 Tipe Penelitian	71
3.2 Lokasi Penelitian	72
3.3 Key Informan dan Informan	73
3.4 Jenis dan Sumber Data	74
3.5 Teknik Pengumpulan Data	75
3.6 Teknik Analisis Data	76
3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	77
3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	78
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	80
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80

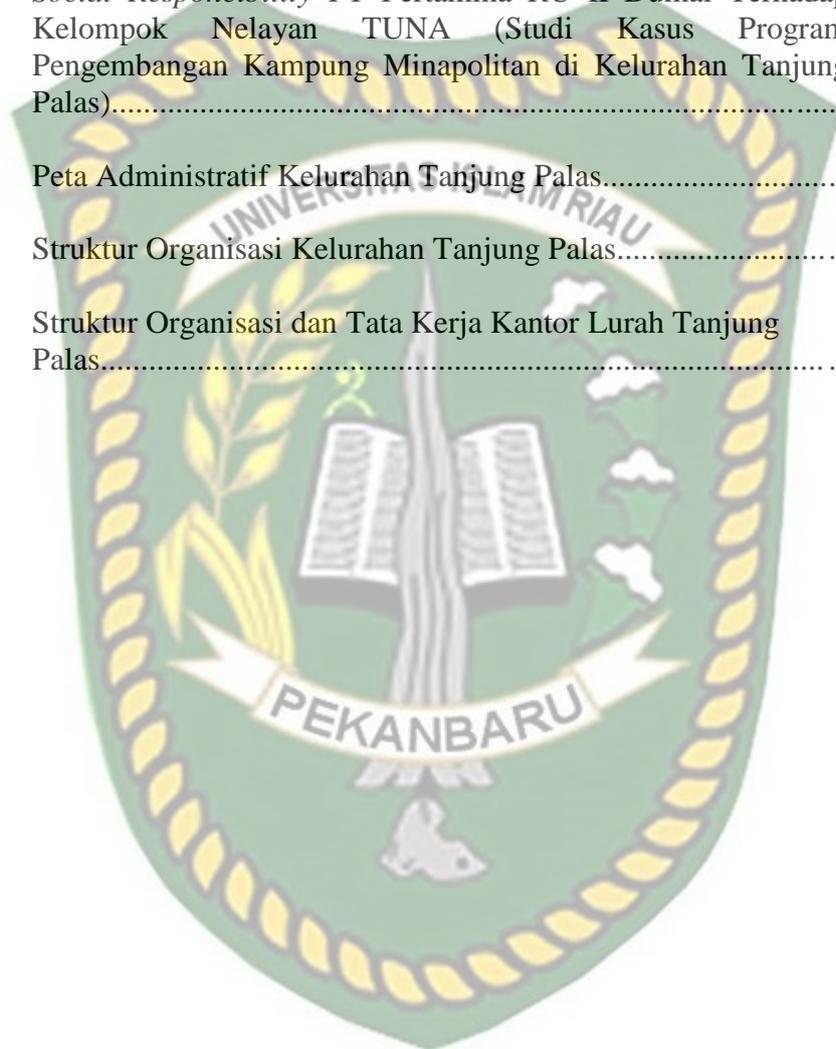
4.2 Visi dan Misi Kelurahan Tanjung Palas	82
4.3 Demografi Kelurahan	84
4.3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Palas	84
4.3.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas	84
4.3.3 Klasifikasi Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas	84
4.3.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Palas	85
4.4 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Palas.....	85
4.5 Struktur Organisasi dan Tata Kantor Lurah Tanjung Palas.....	86
BAB V : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	88
5.1 Penyajian Data Hasil Penelitian.....	88
5.1.1 Identifikasi Key Informan dan Informan	89
5.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	91
5.3 Matriks Hasil Penelitian Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	168
5.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	172
BAB VI : PENUTUP	174
6.1 Kesimpulan	174
6.2 Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN.....	181

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Daftar Program CSR PT Pertamina RU II Dumai	13
I.2 Susunan Pengurus Kelompok Nelayan TUNA.....	14
1.3 Bentuk Bantuan Program Kampung Minapolitan.....	16
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	62
2.2 Operasional Variabel Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolita di Kelurahan Tanjung Palas)	69
3.1 Daftar Key Informan dan Informan	73
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)	77
4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Palas.....	84
4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas.....	84
4.3 Klasifikasi Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas.....	85
4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Palas	85
5.1 Identitas Key Informan dan Informan.....	89
5.2 Matriks Kesimpulan Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 . Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai Terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	64
4.1 Peta Administratif Kelurahan Tanjung Palas.....	82
4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Palas.....	86
4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Tanjung Palas.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Dokumentasi Foto-foto Penelitian tentang Pelaksanaan program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).....	181
2	Daftar Wawancara Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responcibility</i> PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)	189
3	Rencana Strategis Program CSR Pertamina RU II Dumai Tahun 2018-2022	215
4	Surat Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.....	217
5	Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi Riau	218
6	Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Kota Dumai	219
7	Surat keterangan Kelurahan Tanjung Palas	220
8	Surat Keterangan Kecamatan Dumai Timur	221
9	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau	222
10	Surat Keterangan Jurnal Online	223
11	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	224
12	Sertifikat Tes Baca Al'Quran.....	227

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Febriana
NPM : 187110344
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dana tau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Maret 2022
Pelaku Pernyataan,



Winda Febriana
NPM : 187110344

**PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY*
PT PERTAMINA RU II DUMAI TERHADAP KELOMPOK NELAYAN
TUNA (STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG
MINAPOLITAN DI KELURAHAN TANJUNG PALAS)**

Winda Febriana

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program *corporate social responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (studi kasus program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Kartini dengan indikator yang ditetapkan yakni kepemimpinan (*Leadership*), proporsi bantuan, transparansi dan akuntabilitas, cakupan wilayah, perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi, pelibatan *stakeholders*, keberlanjutan, dan hasil nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian pelaksanaan program *corporate social responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok Nelayan TUNA (Studi kasus program pengembangan kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas) menunjukkan hasil kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan program relatif kecil dan tidak sesuai dengan pengajuan kelompok Nelayan TUNA, perusahaan tidak menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program ke Pemerintah Daerah, perusahaan cenderung tidak menerima masukan dari kelompok Nelayan TUNA dalam proses evaluasi, bantuan usaha budidaya yang diberikan perusahaan mengalami kegagalan sehingga tidak ada keberlanjutan pada usaha budidaya, serta tujuan dari program kampung minapolitan belum tercapai. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility* PT Pertamina RU II Dumai yakni tidak adanya peran Forum TJSP dalam pelaksanaan program kampung minapolitan, kurangnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah, tidak adanya transparansi terhadap potensi-potensi perusahaan dalam melaksanakan program CSR, masih kurangnya koordinasi lanjutan terkait program kampung minapolitan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah, serta Masih kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Perusahaan dengan kelompok Nelayan TUNA.

Kata kunci : Pelaksanaan, *Corporate Social Responcibility*, Program Kampung Minapolitan

**IMPLEMENTATION OF PT PERTAMINA RU II DUMAI'S
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM FOR TUNA
FISHERMEN GROUPS (CASE STUDY OF THE MINAPOLITAN
VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IN TANJUNG PALAS
DISTRICT)**

Winda Febriana

*Students of Public Administration program Faculty of Social Science and Politic
Islamic Unversity of Riau, Kaharudin Nasution Street number 13 stop point
Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of PT. Pertamina RU II Dumai's Corporate Social Responsibility program to tuna fishermen groups (Case Study of the Minapolitan village development program in Tanjung Palas District and to find out the inhibiting factors. The research method used was qualitative method. The theory was used was Kartini's Theory with established indicators like as Leadership, proportion of assistance , transparency, and accountability, coverage area, planning and monitoring and evaluation mechanism, and satkeholder involvement, suistainability, and tanguble results. The collection of data that was used were interviews, observations, and documentation studies. The analysis of data technique that wsa used was descriptive analysis. The result of research on The Implementation of PT Pertamina RU II Dumai's Corporate Social Responsibility program for the Tuna Fishermen groups (Case study of the Minapolitan Village development program in Tanjung Palas District) showed that result were not implemented This could be seen from the budget issued by the company for the implementation of the program was relatively small and not in accordance with the submission of the Tuna Fishermen group, The corporation had not submitted an annual report on the implementation of the program to the Regional Goverment, The Corporation tended not to received from Tuna Fishermen groups in the evaluation process, the cultivation business assistance provided by the company has failed. So, there was no sustainability in the cultivation bussiness, and the objectives of the Minapolitan Village program had not been achieved Factors that hinder implementation of PT Pertamina RU II Dumai's Corporate Social Responsibility program were the absence of the role of the TJSP Forum in the implementation of the minapolitan village program, the lack of communication between company and Local Goverment, the absence of transparency on the company's potentials in implementing CSR Programs, the lack of the further coordination realated to the Minapolitan Village program between the Corporation and The Regional Goverment, and there was still a lack of communication and coordination between the Corporation and the TUNA Fishermen groups.

Keywords: *Implementation, Corporate Social Responcibility, Minapolitan Village Program*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di wilayah Indonesia yang diberikan otonomi daerah untuk mengelola seluruh potensi daerahnya. Pengelolaan potensi yang dilakukan membuat Provinsi Riau menjadi salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, dimana kekayaan alam, migas, industri, perdagangan dan sebagainya.

Fakta tersebut didukung dari tulisannya Chaidir (2003) yang menitikberatkan kekuatan Provinsi Riau dalam melakukan otonomi secara garis besar, yaitu : *Pertama*, sumber daya alam dan kapasitas industri sebagai modal yang dimiliki untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan, pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, letak geografis yang strategis sebagai modal untuk membuka hubungan bilateral dibidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara-negara tetangga dalam upaya meraih peluang investasi guna mendorong pertumbuhan di Provinsi Riau.

Implementasi otonomi yang dilakukan oleh daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain. Fakta ini juga terjadi di Provinsi Riau dalam mengelola sumber daya minyak yang dimiliki, dimana ada perusahaan negara yaitu PT. Pertamina RU II Dumai.

PT.Pertamina RU II Dumai merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi minyak dan gas bumi. PT

Pertamina RU II Dumai mengelola minyak mentah (*crude oil*) menjadi bahan bakar minyak (BBM) dan non bahan bakar minyak (Non BBM).

Keberadaan PT Pertamina RU II Dumai yang beroperasi ditengah-tengah masyarakat tentu memiliki beberapa hal yang bisa dikaji dan dibahas melalui hasil temuan yang dapat peneliti lihat melalui observasi dan bertanya langsung kepada masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui hasil Survey yang dilakukan, PT Pertamina RU II Dumai termasuk Perusahaan yang tertutup dan tidak terbuka akan informasi yang diberikan.

Peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat merasakan beberapa dampak atas kehadiran dari PT Pertamina RU II Dumai yaitu suhu udara yang panas akibat dari obor PT Pertamina RU II Dumai dan bau gas yang busuk berasal dari Kilang Pertamina RU II Dumai dirasakan sangat menyengat penciuman para warga sekitar.

Peneliti juga menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa Masyarakat yang tinggal dekat kilang Pertamina RU II Dumai tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, kini hidup dalam kecemasan. Biang masalahnya adalah terkait partikel sisa pembakaran green coke yang berterbangan dihalaman rumah warga. Sekretaris LPMK Kelurahan Tanjung Palas, Bapak Dahlan menanggapi hal tersebut bahwa debu green coke sudah menjadi masalah sejak dulu, tak ayal dampak polusi debu green coke berdampak langsung ke permukiman sampai membuat warga dirugikan, Butiran debu hitam green coke kondisinya cukup mengkhawatirkan kondisi kesehatan masyarakat.(Wahana Riau.Com)

Hendrik dalam Wedayanti (2018:10), mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan CSR dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

Penerapan *corporate social responsibility* menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya sekedar menjalankan kegiatan usaha, tetapi perusahaan juga harus berada dalam kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperlukan di sekitar perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan atas dasar seperti kepastian hukum, kepentingan umum dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 7 Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak dalam menyiapkan program *Corporate Social Responsibility* yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkelanjutan, menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan penanggung jawab, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mendapatkan fasilitas dan atau penghargaan dari pemerintah daerah berbasis perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam mengoperasikan perusahaan minyaknya, PT Pertamina RU II Dumai tentunya beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat. Realitas ini menuntut PT Pertamina RU II Dumai untuk memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang berada disekitar wilayah operasionalnya. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT Pertamina RU II Dumai dituangkan melalui program *corporate social responcebility* (CSR).

Agar CSR ini bisa berjalan baik, maka perlu peraturan pemerintah yang mengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka *law enforcement*, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perusahaan-perusahaan perlu diyakinkan, bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan. Karena itu, penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai *cost* semata-mata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku. Dengan adanya aturan hukum, yakni Undang-undang dan Peraturan maka perbedaan kepentingan antara para pihak baik perusahaan dan masyarakat dapat dijembatani secara elegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. (<https://trihastutie.wordpress.com/2009/01/16/hello-world/> diakses pada 26 Desember 2021).

Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan tentunya memiliki hubungan diantara Perusahaan dan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah tidak hanya

bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, karena memiliki *partner* dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya, pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk tatanan masyarakat agar kearah yang lebih baik dan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah (Wedayanti.2019:62)

Adapun Dasar Hukum dan Payung Hukum pendukung CSR di Indonesia adalah sebagai berikut yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur didalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan program-program *Corporate Social Responcibility*, perusahaan tentu harus menerapkan Prinsip dasar Tanggung jawab Sosial Perusahaan menurut Elkington (dalam Wedayanti,2018: 52) yang menyebutkan konsep 3P yang berupa, *Profit, People, Planet*.

Profit diartikan sebagai Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. *People* diartikan sebagai Perusahaan harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Perusahaan. Dan *Planet* diartikan sebagai perusahaan haruslah memberikan perhatian penuh terhadap keberlanjutan keberagaman hayati.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang baik tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah. Berikut beberapa yang diperoleh dari adanya *Corporate Social Responcibility* :

1. Manfaat bagi perusahaan

Citra perusahaan akan terkenal baik bahwa inilah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masyarakat. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, akibatnya perusahaan akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Secara tidak langsung maka produk yang di produksi oleh perusahaan tersebut membuat konsumen meningkat karena konsumen cenderung melihat dari citra perusahaannya.

2. Manfaat bagi masyarakat

Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan ke dua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksplotasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik. Tidak hanya dari sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain. Dan adanya beasiswa terhadap anak tidak mampu dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat.

Dengan adanya *Corporate Social Responcibility* tersebut akan memberikan hal-hal berikut pada masyarakat:

- a. Kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan meningkat;
 - b. Tersedianya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada disekitar perusahaan;
 - c. Fasilitas umum terjamin pemeliharannya;
 - d. Terdapat kegiatan sosial berupa pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar perusahaan.
3. Manfaat bagi pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat nya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan adanya perusahaan menjalankan program-program CSR mampu menyelesaikan permasalahan yakni dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, masalah lingkungan dan lain sebagainya dan hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan diharapkan mampu membangun daerah kawasan dalam menjalankan otonomi daerah dengan melaksanakan program CSR baik pemberdayaan masyarakat maupun dalam segi pembangunan dan melihat adanya

sinergi dari Pemerintah provinsi terhadap kebijakan yang dibuat apakah permasalahan-permasalahan yang ada teratasi dengan dibentuknya sebuah solusi dalam bentuk peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 pada Bab VI Pasal 10 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bagian Program dan Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah :

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/ atau sumbangan/ donasi, dan/atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/ atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baik Provinsi dan/ atau Kabupaten / Kota setempat.

Tujuan umum Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Sanksi-sanksi yang diterima apabila melanggar pelaksanaan CSR dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yakni BAB XII pada pasal 32 yakni :

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 yakni bidang Program TJSP dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; dan b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- (3) Mekanisme dan Syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan didalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial perusahaan, perusahaan merupakan pelaksana program TJSP yang tentu masyarakat dan kawasan lingkungan operasi sebagai objek dari pelaksanaan TJSP yang tentunya dilandasi dengan kebijakan dan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Forum TJSP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Bab IX bagian kesatu Pasal 26 yakni :

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP dipimpin oleh Gubernur pada tingkat provinsi, Bupati/walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, beranggotakan Unsur SKPD terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Melayu Riau, dan forum sejenisnya.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Riau, dan Forum TJSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD masing-masing Kabupaten/Kota).
- (4) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan TJSP di Provinsi Riau.
- (5) Keanggotaan Forum TJSP berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Bappeda Provinsi Riau.
- (6) Struktur Forum terdiri dari Dewan Penasehat (terdiri dari unsur DPRD, LAMR dan Akademisi) dan Dewan Pelaksana (Ketua : Gubernur, Wakil Ketua I : Unsur SKPD, Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha, Wakil Ketua III : Unsur Perguruan Tinggi, Wakil Ketua IV : Unsur LAMR, Sekretaris : Bappeda, Anggota : Forum PKBL BUMN/BUMD, Forum BP Migas, Asosiasi Pengusaha, unsur SKPD terkait, Forum-forum sejenisnya)

Dengan Adanya sanksi, pelaksana, sasaran dan pengawasnya, Peraturan Daerah tersebut harus ada Komunikasi Kebijakan Publik agar Program-program yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan didengarkannya pendapat atas dampak yang disebabkan dari operasi perusahaan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Dumai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang beroperasi di wilayah daerah.
- (3) TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berbunyi:

- (1) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 6 (enam) program utama, yakni:
 - a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
 - b. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - d. Kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - e. Tanggap darurat sosial dan bencana alam; dan
 - f. Pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari operasional perusahaan.

Dwijowijoto (2003) menyebutkan bahwa sebuah kebijakan termasuk Peraturan yang dibentuk pemerintah adalah jalan mencapai tujuan bersama yang

dicita-citakan, yakni dalam pencapaian tujuan yang dituangkan dalam kebijakan publik pada dasarnya bisa dilaksanakan secara berkelanjutan apabila komponen dalam proses kebijakan yakni Stakeholder termasuk Pemerintah, masyarakat dan swasta, benar-benar memahami akan kebijakan yang akan dilaksanakan dimana mengingat masyarakat kembali menjadi sasaran pencapaian tujuan sampai tingkat terendah.

Kebijakan Ekonomi termasuk kedalam kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan pengarah kearah tujuan negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang 1945, yaitu kesejahteraan yang adil dan makmur, yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dibidang ekonomi, baik dari segi penerapan dan peningkatan ekonomi pasar hingga pelaksanaan koordinasi yakni adanya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMN yakni Perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Pertamina RU II Dumai dituangkan kedalam program *Corporate Social Responcibility*. Berikut beberapa program CSR yang dimiliki oleh PT Pertamina RU II Dumai:

Tabel I.1 Daftar Program CSR PT Pertamina RU II Dumai

No	Program CSR	Sasaran
1	Kampung Minapolitan	Kelompok Nelayan Tuna
2	Dewi Gatra	Kelompok Tani Paman Jaya
3	Usaha Ekonomi Kreatif	Kelompok Mitra Persada dan Kelompok Keberkahan Bersama
4	Pertamina Sehati	Kelompok Posyandu Sehati

Sumber : PT Pertamina RU II Dumai

Pada Tabel I.1 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat program CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina dalam bidang Pemberdayaan masyarakat. Dimana salah satunya adalah Program Kampung Minapolitan dengan sasaran kelompok nelayan TUNA. Meskipun terdapat beberapa program CSR yang dijalankan oleh PT Pertamina RU II Dumai, namun peneliti lebih cenderung mendalami pelaksanaan Program Kampung Minapolitan dengan sasaran Kelompok Nelayan TUNA (Tanjung Palas Utuh Nelayan Asli).

Program *Corporate Social Responsibility* tersebut bertujuan mengembangkan Kampung Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan di Kelurahan Tanjung Palas yang berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat nelayan. Program tersebut di mulai pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mendatang sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat dengan turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nelayan.

Kelompok Nelayan TUNA merupakan mitra binaan CSR PT Pertamina RU II Dumai di Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai. Terdapat 15 nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan TUNA.

Tabel I.2 Susunan Pengurus Kelompok Nelayan TUNA

No.	Nama Nelayan	Jabatan
1	Dahlan Zainudin	Ketua
2	Ariyanto	Sekretaris
3	Syahrudin	Bendahara
4	Mohammad Nain	Anggota
5	Usman	Anggota
6	Abdul Rahman	Anggota
7	Alwi Jaya	Anggota
8	Anasri	Anggota
9	Zulkarnain	Anggota
10	Nur Azmi	Anggota
11	Rozali	Anggota
12	Abdul Majid	Anggota
13	Mahendra Pela	Anggota
14	Syafriyadi	Anggota
15	M. Saharul	Anggota

Sumber : Kelompok Nelayan TUNA

PT Pertamina RU II Dumai menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dalam hal pendampingan kelompok Nelayan TUNA untuk budidaya. Adapun Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dalam Program Kampung Minapolitan ini yaitu memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap Kelompok Nelayan TUNA Kelurahan Tanjung Palas.

Berdasarkan buku yang berjudul Pengembangan Kawasan Minapolitan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), Minapolitan terdiri dari kata Mina dan kata Politan (polis). Mina berarti Perikanan

dan Politan berarti Kota, sehingga diartikan sebagai Kota Perikanan atau Kota di daerah lahan Perikanan atau Perikanan di daerah Kota.

Dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), disebutkan bahwa Minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir dimana diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Selanjutnya dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), mengemukakan bahwa Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Sedangkan dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan pedesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan pedesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (*urban function center*) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan pedesaan (*regional income*).

Adapun bentuk bantuan yang disalurkan PT Pertamina RU II Dumai untuk Program Kampung Minapolitan dengan sasaran Kelompok Nelayan TUNA di Kelurahan Tanjung Palas sebagai berikut:

Tabel I.3 Bentuk Bantuan Program Kampung Minapolitan

No.	Bentuk bantuan	Tahun
1.	Pembelian alat tangkap ikan dan perbaikan kapal,serta budidaya ikan lele	2018
2.	Pembelian alat tangkap, dan perlengkapan lain, pengembangan kolam ikan, serta budidaya tanaman aquaponik, budidaya maggot (pakan alami).	2019

Sumber : Kelompok Nelayan TUNA

Berdasarkan tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan untuk program pengembangan kampung minapolitan yakni sejak tahun 2018.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Program pengembangan kampung minapolitan terindikasi belum memberikan kontribusi yang tepat terhadap hasil yang diinginkan oleh kelompok nelayan TUNA. Hal ini disampaikan oleh bapak Dahlan selaku ketua kelompok nelayan TUNA :

“...dengan adanya program ini harapan kami kan untuk peningkatan ekonomi, tetapi belum terkejar kalau untuk peningkatan ekonomi, masih sama saja, kami sudah berusaha itu tergantung rezeki lagi..” (sumber : hasil wawancara dengan bapak Dahlan yang merupakan ketua kelompok Nelayan TUNA,8 agustus 2021, pukul 19.53 wib)

Serta Bentuk bantuan yang diberikan banyak keagalannya, misalnya pada tahun 2019 kelompok nelayan TUNA tidak memperoleh keuntungan dari budidaya ikan, dan untuk tanaman Aquaponik juga tidak tumbuh dengan subur sehingga hasil panen nya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disampaikan oleh bapak Dahlan selaku ketua kelompok nelayan TUNA:

“...Tahun 2018 kolam ikan ada balik modal dan keuntungan sedikit, tahun 2019 tidak dapat untung, modal pun jauh kembalinya, terus ada juga budidaya tanaman aquaponik ada sekitar 60 tanaman, pertumbuhannya pun tidak sesuai seharusnya 100 hari sudah ada 8-10 lembar daunnya, ini baru 4 lembar, tetapi akhirnya di panen juga daripada mati lama-lama...”

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti dilapangan ditemukan beberapa temuan diatas sehingga peneliti menyimpulkan beberapa fenomena, sebagai berikut:

1. Program pengembangan kampung minapolitan yang merupakan program CSR PT Pertamina RU II Dumai masih belum memberikan kontribusi yang tepat terhadap hasil yang diinginkan oleh kelompok nelayan TUNA.
2. Bentuk bantuan yang diberikan untuk Program Kampung Minapolitan kerap kali gagal dan tidak menghasilkan keuntungan bagi Kelompok Nelayan TUNA.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan program *corporate social responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (studi kasus program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT Pertamina RU II Dumai dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis, serta meningkatkan pemahaman mengenai CSR terutama pelaksanaan Program CSR.
2. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah.
3. Manfaat Akademik, yaitu sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu mengutip pendapat para ahli dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi yang tepat dengan masalah penelitian yang dirumuskan, agar dapat memecahkan fenomena penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

2.1.1 Konsep Administrasi

Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. (dalam Maksudi, 2018:27)

Sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah sebagai pengendali usaha, sedangkan penyelenggara adalah yang mengerjakan usaha, yaitu tata usaha (TU). (dalam Maksudi, 2018:26)

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Wirman, 2012:9)

The Liang Gie dalam Pasalong (2016:3), menyebutkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut Leonardo D.White dalam Wirman (2012:9), memberi pemahaman bahwa administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.

Sedangkan menurut Dwight Waldo dalam Maksudi (2018:27), mengatakan administrasi adalah : *“Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”*

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam Wirman (2012:15), menyebutkan bahwa publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Sedangkan Syafiie dkk dalam Pasalong (2016:6), mengemukakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Dalam ilmu administrasi terdapat beberapa macam administrasi, salah satunya administrasi publik. Pada ilmu administrasi publik juga ditemukan beragam definisi, namun substansinya tetap sama, yaitu berbicara tentang kerja sama kelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.

Bartholomew berpendapat dalam Wirman (2012:24), bahwa administrasi publik adalah proses penyelenggaraan kehendak publik (public will) sebagaimana yang dinyatakan didalam hukum, dengan kata lain pengoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum.

Willoughby dalam Maksudi (2018:225), mendefinisikan bahwa Administrasi Publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya

seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah.

Sondang P. Siagian dalam Wirman (2012:25), mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sedangkan Leonardo D. White dalam Maksudi (2018:225), mengemukakan bahwa administrasi publik terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara.

Herbert A. Simon, Donald W. Smithurg, dan Victor A. Thomson dalam Wirman (2012:23), mengemukakan bahwa administrasi publik ialah aktivitas-aktivitas cabang eksekutif dari pemerintahan tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus.

Nicholas Henry dalam Pasalong (2016:8), mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Lebih lanjut menurut Woodrow Wilson administrasi publik adalah :

“Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta” (dalam Wirman, 2012:21).

Dwight Waldo dalam Wirman (2012:21), lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Henry Fayol dalam Maksudi (2018:188), mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. *Division of Work* (pembagian kerja)
Prinsip ini memiliki tujuan adalah spesialisasi menambah hasil kerja yang lebih banyak dan lebih baik dengan cara membuat para pekerja lebih efisien.
2. *Authority and Responsibility* (Wewenang dan Tanggung jawab)
Wewenang adalah hak manajer yang diberikan kepadanya untuk memberikan perintah atau intruksi dan kekuasaan meminta kepatuhan. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab, yaitu tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang pejabat atau manajer, karena itu agar dapat dilaksanakan, maka wewenang harus diberikan kepadanya. Agar kepatuhan diperoleh dari bawahan, sanksi dapat diterapkan kepada mereka yang tidak memberi kepatuhan. Tetapi agar efektif, wewenang seorang administrator atau manajer harus sama dengan tanggung jawabnya.
3. *Discipline* (Disiplin)
Hakikat dari kepatuhan adalah disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dengan pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa peraturan atau kebiasaan. Disiplin sangat penting karena suatu usaha tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya disiplin pada pihak atasan dan bawahan, serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.
4. *Unity of Comand* (Kesatuan Perintah)
Untuk setiap tindakan, seorang pegawai harus menerima instruksi-instruksi dari seorang atasan saja. Bila hal ini dilanggar, wewenang berarti dikurangi, disiplin terancam, keteraturan terganggu dan stabilitas akan goyah.
5. *Unity of Direction* (Kesatuan Pengarahan)
Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana.
6. *Subordination of Individual Interest to the General Interest* (Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan sendiri)
Prinsip ini adalah kepentingan seorang atau kelompok pegawai tidak boleh diatas kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. *Remuneration* (Pembayaran upah yang adil)
Para pegawai harus digaji sesuai dengan jasa atau layanan yang mereka berikan. Karena itu harus adil, sejauh mungkin memberi kepuasan baik kepada pegawai maupun kepada perusahaan.
8. *Centralization* (Sentralisasi)
Indikator nya dilihat sejauh mana para bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu pada manajemen atau pada

para bawahan adalah masalah proporsi yang tepat. Kuncinya terletak pada bagaimana menemukan tingkat sentralisasi yang optimal untuk setiap situasi.

9. *Scalar chain* (Rantai skalar)

Rantai skalar adalah garis wewenang dari manajemen puncak sampai tingkat yang paling bawah. Komunikasi harus mengikuti rantai ini.

10. *Order* (Tata Tertib)

Orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Artinya untuk ketertiban manusia ada formula yang harus dipegang, yaitu suatu tempat untuk setiap orang pada tempatnya masing-masing.

11. *Equity* (Keadilan)

Untuk merangsang pegawai melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan, mereka harus diperlakukan dengan ramah dan keadilan. Kombinasi dari keramahan dan keadilan menghasilkan Equity.

12. *Stability of Tenure of Personnel* (Stabilitas Masa Kerja Pegawai) Perputaran (*turnover*) pegawai yang tinggi adalah tidak efisien. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada penggantinya.

13. *Inisiatif* (Inisiatif)

Kesanggupan bagi berpikir dan kemampuan melaksanakan adalah apa yang disebut inisiatif. Sumber kekuatan suatu perusahaan adalah adanya inisiatif baik dikalangan atasan maupun bawahan, khususnya pada masa sulit. Oleh Karena itu, penting menggairahkan dan mengembangkan insiatif semaksimal mungkin.

14. *Esprits de Corps* (Semangat Kesatuan)

Mendorong *team spirit* akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi. Persatuan merupakan kekuatan, karena itu para pemimpin perusahaan harus mampu menciptakan keharmonisan, persatuan, dikalangan para pegawai perusahaan.

2.1.2 Konsep Organisasi

Sondang P. Siagian (1994), mendefinisikan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Stephen P. Robbins dalam Maksudi (2018:38), berpendapat bahwa organisasi adalah sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar,

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sedangkan John D. Millet dalam Maksudi (2018:39), mengemukakan bahwa organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Lebih lanjut, James D Mooney dalam Maksudi (2018:39), menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Meskipun definisi yang dikemukakan oleh para ahli tampak berbeda-beda, namun titik umum pandangannya tetap sama, yaitu suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pemahaman organisasi diatas, ditemukan berbagai unsur-unsur yang membentuk organisasi yaitu :

1. Adanya suatu tujuan bersama;
2. Adanya bentuk kerjasama dua orang atau lebih;
3. Adanya pembagian kerja;
4. Adanya suatu kehendak untuk melakukan kerjasama.

Manfaat organisasi dalam Maksudi (2018:38) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang dapat berkumpul, dan melakukan kerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya) yang digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.
2. Membantu dan memudahkan pemecahan permasalahan seorang individu maupun kelompok. Memberikan kesempatan kepada seorang individu maupun kelompok untuk memuaskan kebutuhannya, seperti pangan, sandang, dan papan.
3. Memberikan kebutuhan yang bersifat rohani, seperti perasaan aman, kasih sayang, pergaulan, dan lain-lain.
4. Memberikan nilai hidup yang lebih bernilai, norma perilaku, pengetahuan kolektif, dan visi.

Menurut Zulkifli dan Nurmasari (2015:99) organisasi ada dua, yaitu:

- a. Organisasi dalam arti badan ialah kelompok orang yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.
- b. Organisasi dalam arti bagan ialah gambaran skematis tentang suatu bentuk hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tertentu dalam pencapaian tujuan.

Atmosudirdjo dalam Zulkifli dan Moris (2014:39), mengemukakan prinsip-prinsip organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya kerjasama yang teratur dan secara berkelanjutan dengan orang-orang yang bersangkutan
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang setara
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan sejelas-jelasnya
5. Adanya kesatuan komando dan hirarki
6. Komunikasi harus dilakukan dengan semaksimalnya
7. Kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya
8. Pekerjaan tidak boleh terhenti karena adanya seseorang yang berhalangan
9. Saling asuh antara instansi line dan staf
10. Harus adanya koordinasi

11. Adanya kehayatan
12. Tahu diri pada setiap warga organisasi.

2.1.3 Konsep Manajemen

George R. Terry dalam Maksudi (2018:79), mendefinisikan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Henry Simamora dalam Pasalong (2016:83), mengemukakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan Mary Parker Follet dalam Maksudi (2018:79), mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Donovan dan Jackson dalam Pasalong (2016:82), mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (skills), dan sebagai serangkaian tugas.

Lebih lanjut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam Maksudi (2018:79), menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Sedangkan Stoner dan wankel dalam Pasalong (2016:82), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

George R. Terry mengemukakan enam unsur-unsur manajemen (dalam Priansa, 2014:33) yaitu terdiri atas :

1. *Man* (manusia, tenaga kerja) adalah Titik pusat manajemen adalah manusia yang berhak sebagai pelaksana, karena tidak ada manajemen tanpa manusia. Dengan demikian faktor manusia merupakan unsur yang paling penting dan menentukan dalam setiap bentuk kegiatan manajemen. Manusia yang menentukan tujuan, yang menggunakan dan melaksanakan proses kegiatan manajemen. Jadi, manusia yang semuanya merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi setiap kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. *Money* (uang atau pembiayaan) adalah Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan manajemen adalah uang. Pengaruh uang sangat besar, karena uang dibutuhkan oleh setiap manusia, disamping sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai besar atau kecilnya suatu kegiatan. Suatu perencanaan yang diprogramkan bila tanpa ada unsur pendukung yang akan membiayai dari kegiatan tersebut maka akan sia-sia.
3. *Material* (bahan-bahan atau perlengkapan), Sebagai perlengkapan dari suatu yang dibutuhkan, maka adanya bahan yang dapat diolah merupakan tindak lanjut dari sebuah proses manajemen. Tanpa adanya material (bahan-bahan), manusia tidak dapat berbuat banyak dalam mencapai tujuannya tanpa adanya material yang akan diproses, tidak mungkin ada wujud dari hasil yang diproses.
4. *Machines* (mesin-mesin) Adalah alat pelengkap guna memudahkan suatu proses. Selain itu, suatu kegiatan dapat dikatakan cepat dan mudah bila disertai adanya alat sebagai pelengkap. Lebih dari itu, di zaman yang lebih menonjol sisi-sisi kemutakhirannya dengan adanya sebuah mesin-mesin yang dianggap canggih sehingga hasil yang diperolehnya dapat efektif dan efisien, seperti halnya komputer, alat tulis menulis dan yang lainnya yang mendukung.
5. *Method* (metode, cara, sistem kerja), Cara melaksanakan suatu pekerjaan guna pencapaian tujuan yang tertentu, maka penggunaan metode tertentu pula yang akan mengiringinya. Metode guna pencapaian sesuatu juga sebagai sarana kelancaran dalam merampungkan tugas.
6. *Market* (pasar), Sebagai hasil dari produktifitas maka akan berakhir juga lingkup yang lebih luas, yaitu pasar. Karena, tanpa kita sadari tujuan produktifitas adalah pemuasan konsumen terhadap barang yang kita hasilkan. Peran pasar sangat penting, yakni sebagai tempat untuk memasarkan hasil produksi (barang) dari suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai unsur produksi manajemen. Baik buruknya suatu kualitas atau besar kecilnya suatu laba yang akan diperoleh suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat tergantung bagaimana metode penguasaan pangsa pasar itu sendiri.

Rue dan Byars, Fremont E. Kast dan James E. Rosenweig dalam Maksudi (2018:80), mengatakan bahwa Henri Fayol adalah orang pertama yang mengidentifikasi fungsi manajemen spesifik (*function of management*) yang merupakan hal penting di dalam keberhasilan berorganisasi, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah kegiatan-kegiatan Penetapan rencana yang yang dapat dicapai organisasi.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi.
3. Kepemimpinan (*Commanding*) adalah kegiatan memotivasi dan memengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
4. Koordinasi (*Coordinating*) adalah kegiatan menyerasikan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya.
5. Pengawasan (*Controlling*) adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, masih banyak lagi pandangan yang berbeda satu sama lain di kalangan para ahli tentang perumusan fungsi manajemen, diantaranya George R. Terry dalam Maksudi (2018:83), merumuskan fungsi-fungsi manajemen yaitu :

1. Perencanaan (*planning*) adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. Pengarahan (*actuating*) adalah pengarahan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4 Konsep *Corporate Social Responsibility*

Suhandari dalam Wedayanti (2018:10), mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan CSR dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Hackson dan Milne (1996), mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan atau organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan dokumen draf dokumen ISO 26000, definisi *Social Responsibility* yaitu etika dan tindakan terkait tanggung jawab organisasi yang mempertimbangkan dampak aktivitas organisasi pada berbagai pihak dengan cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Suhandari (2016:1), berpendapat bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Darwin dalam Wedayanti (2018:9), menyatakan bahwa *Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan mekanisme bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk sukarela mengintegrasikan perhatian

terhadap lingkungan maupun sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum.

The world Business Council for Sustainable Development (WBCDS) dalam Wedayanti (2018:9), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Menurut Hendrik (2008:9) tujuan CSR adalah untuk memperdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.

Menurut Heimann dalam Wedayanti (2018:57) menyebutkan beberapa alasan mengapa CSR penting yaitu :

1. Merupakan hal etis yang perlu dilakukan;
2. Meningkatkan citra perusahaan;
3. Menghindari peraturan yang berlebihan;
4. Jenis kegiatan tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan;
5. Lingkungan sosial yang lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan;
6. Dapat menarik minat investor;
7. Dapat meningkatkan motivasi karyawan;
8. Memperbaiki masalah sosial.

Sedangkan menurut Bhatt dalam Wedayanti (2018:57) terdapat 3 alasan mengapa perusahaan melakukan CSR yakni :

1. Perusahaan setidaknya harus patuh (*comply*) terhadap aturan nasional. Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku.
2. *Risk minimisation*. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari impact nyata dan impact potensial secara sosial ekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk

meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnis nya.

3. *Value creation*. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, perusahaan dapat menciptakan “*positive social value*” dengan melibatkan masyarakat didalamnya (*engage in*), seperti inovasi investasi sosial (*innovative social investment*), konsultasi dengan stakeholders, dialog kebijakan (*policy dialogue*), dan membangun istitusi masyarakat (*building civic institution*), baik secara mandiri ataupun bersama dengan perusahaan yang lain.

Dalam Wedayanti (2018:58), disebutkan bahwa dalam melakukan CSR tentunya perusahaan memiliki alasan diantaranya adalah:

1. Alasan Sosial

Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2. Alasan Ekonomi

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun *image* positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

3. Alasan Hukum

Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena adanya tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan.

Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah.

Crowther David dalam Wedayanti (2018:50), mengemukakan tiga prinsip dasar Corporate Social Responsibility yakni :

1. *Sustainability*

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Sehingga *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa depan.

2. *Accountability*

Accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media perusahaan dalam membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Hadi (2009) tingkat keeluasaan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholder* eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.

3. *Transparency*

Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. David mengemukakan bahwa prinsip transparansi berarti dampak eksternal dari aktivitas organisasi dapat diketahui dari pelaporan organisasi dan tidak ada fakta yang disembunyikan dalam pelaporan tersebut. Dampak eksternal organisasi harus jelas bagi semua pihak, dengan menggunakan informasi yang berasal dari mekanisme pelaporan organisasi tersebut. Transparansi merupakan satu hal yang sangat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak pada lingkungan.

Selanjutnya Elkington dalam Wedayanti (2018:52), mengemukakan tiga prinsip dasar *Corporate Social Responsibility* yang biasa disebut dengan konsep 3P atau *triple bottom line*, yaitu :

1. *Profit*

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang.

2. *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti

pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

3. *Plannet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keberagaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (*ecotourism*), dan lain-lain.

Wibisono mengemukakan dalam Wedayanti (2018:73) terdapat empat tahapan CSR, yaitu :

1. Tahap perencanaan

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*, *CSR Assesment*, dan *CSR Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah utama membangun kesadaran pentingnya CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan lain-lain. *CSR Assesment* merupakan upaya memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya membangun *CSR Manual Building*, dapat melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif, dan efisien.

2. Tahap implementasi

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang penting diperhatikan, yaitu pengorganisasian (*organizing*) sumber daya, penyusunan (*staffing*), pengarahan (*direction*), pengawasan atau koreksi (*controlling*), pelaksanaan sesuai rencana, dan penilaian (*evaluation*) tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR.

4. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun system informasi baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut Ernie (2009:78) jenis program CSR BUMN Indonesia pada umumnya meliputi:

1. Program kemitraan yang mayoritas dengan UMKM
2. Program bina lingkungan terbagi :

- a. Bantuan bencana alam
- b. Kesehatan Masyarakat
- c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat
- d. Keagamaan
- e. Pengembangan sarana umum
- f. Pelestarian alam

Kotler dan Lee dalam Wedayanti (2018:81), mengatakan bahwa terdapat enam bentuk program CSR yaitu sebagai berikut:

a. *Cause Promotion*

Perusahaan yang menggunakan jenis program CSR bentuk ini menyediakan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi CSR atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau dalam rangka merekrut relawan untuk mendukung masalah sosial tersebut. Aktivitas program CSR ini pada akhirnya mampu mendorong masyarakat untuk mendonasikan waktunya, uang, atau sumber daya lainnya. Berbagai keuntungan potensial dapat diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan kegiatan *Cause Promotion* adalah memperkuat *brand positioning* perusahaan, memberikan peluang kepada karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadi kepedulian mereka, menciptakan kerja sama antara perusahaan dengan pihak-pihak lain serta meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*).

b. *Cause Related Market* (CRM)

Perusahaan yang mengimplementasikan CSR tipe ini berkomitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. CSR tipe ini pertama-tama perusahaan melakukan penilaian atau *assessment* terhadap situasi, kemudian menetapkan tujuan, memilih target, audiens, dan pada akhirnya melakukan perhitungan terhadap rencana pemasaran, rencana anggaran, serta rencana implementasi dan evaluasi.

c. *Corporate Social Marketing* (CSM)

Dalam program CSR ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah meningkatkan *brand positioning* atau penguatan merek perusahaan dimana konsumen, mendorong peningkatan penjualan, mendorong antusiasme partner perusahaan untuk mendukung program ini, serta memberikan dampak nyata pada perubahan sosial.

d. *Corporate Philanthropy* (CP)

Perusahaan dengan program CSR ini memberikan kontribusi langsung secara Cuma-Cuma (*charity*) dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dengan sejenisnya. CP pada umumnya berkaitan dengan masalah sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan, diantaranya dalam bentuk sebagai berikut:

- (1) menyiapkan sumbangan tunai;
 - (2) menawarkan bantuan/sokongan;
 - (3) memberikan beasiswa;
 - (4) pemberian donasi produk;
 - (5) pemberian layanan; dan
 - (6) pemberian kontribusi perusahaan dengan jasa keahlian dan pemakaian peralatan secara Cuma-Cuma.
- e. *Community Volunteering (CV)*
Melalui program ini mendukung serta mendorong para karyawan, pemegang rekan pedagang eceran atau *franchise* untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Keuntungan dengan menjalankan program ini adalah terciptanya hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.
- f. *Socially Responsible Business Practise (Community Development)* Menurut Kotler, *Community Development* adalah praktik bisnis dimana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan. Perusahaan yang melakukan praktik bisnis melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. *Socially Responsible Business Practise* mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) membuat fasilitas yang sesuai dengan standar keamanan yang direkomendasikan; (2) mengembangkan kegiatan pengurangan sampah dan mengolah nya kembali; (3) menghentikan penawaran produk yang membahayakan kesehatan manusia; (4) memilih pemasok yang menggunakan material ramah lingkungan; (5) mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan karyawan.

Implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah komitmen pimpinannya, ukuran atau kematangan perusahaan, regulasi atau sistem perpajakan yang diatur pemerintah dan sebagainya (Wibisono,2007). Merujuk pada Saidi dan Abidin (2004) dalam Wedayanti (2018:83), ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu :

1. Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary*

atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan diperusahaan-perusahaan dinegara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dan abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintahan, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati bersama.

Secara garis besar, CSR menyangkut empat dimensi yaitu :

1. Tanggung jawab ekonomi; untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik dan masyarakat.
2. Tanggung jawab hukum; untuk mematuhi hukum.
3. Tanggung jawab etis; yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi melakukan apa yang benar, wajar dan adil.
4. Tanggung jawab filantropis; untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan berniat baik.

Selanjutnya Carroll dalam Wedayanti (2018:95), menjelaskan dimensi-dimensi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu :

1. *Economic responsibilities* (tanggung jawab ekonomi)
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. *Legal responsibilities* (tanggung jawab hukum)
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Contoh : taat membayar pajak, taat kepada undang-undang ketenagakerjaan.
3. *Ethical responsibilities*
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh wirausahawan secara

perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu dimana penilaian ini merupakan penilaian terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Individu atau organisasi melalui penilaian tersebut, akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak adil, serta memiliki kegunaan atau tidak.

4. *Discretionary responsibility*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis dan dilakukan perusahaan secara sukarela.

Selanjutnya, Ciri-ciri dari implementasi corporate social responsibility (CSR)

adalah sebagai berikut :

- a. CSR seharusnya melakukan aktivitas yang melebihi kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. CSR seharusnya bisa menghasilkan dampak semi permanen bagi perusahaan dan masyarakat.
- c. CSR harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan.
- d. CSR harus mengandung sistem *governance* yang layak, bersamaan dengan transparansi dan tanggung jawab.
- e. CSR seharusnya mengikuti ISO 26000.

Kemudian terdapat prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi :

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrument/badan-badan internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Kartini (2009:54), menyebutkan bahwa ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran untuk kinerja kunci dalam pelaksanaan CSR, yaitu :

1. *Leadership* (kepemimpinan)
 - Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapat dukungan dari top manajemen perusahaan.

- Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program.
2. Proporsi Bantuan
CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolok ukur, apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.
 3. Transparansi dan Akuntabilitas
 - Terdapat laporan tahunan (*annual report*).
 - Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para penerima manfaat.
 4. Cakupan wilayah (*coverage area*)
Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah dilakukan.
 5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
 - Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multi stakeholder* pada setiap siklus pelaksanaan proyek.
 - Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (*local wisdom*), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada.
 - Terdapat *blue-print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan program.
 6. Pelibatan Stakeholder (*Stakeholders Engagement*)
 - Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan *stakeholders*, utamanya masyarakat.
 - Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.
 7. Keberlanjutan (*Sustainability*)
 - Terjadi alih-peran dari korporat ke masyarakat.
 - Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik.
 - Adanya pilihan *partner* program yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan *partner* tersebut.
 8. Hasil nyata
 - Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan.
 - Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.
 - Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

- Terjadinya penguatan komunitas (*community empowerment*).

2.1.5 Konsep CSR dan Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) telah lahir semenjak pertengahan abad ke-17 dengan makna menanamkan kewenangan (*to invest with authority*) atau memberi kewenangan (*authorize*). Dalam pengertian umum pemberdayaan berarti untuk memungkinkan (*to enable*) atau mengizinkan (*to permit*), atau mengajarkan kepada seseorang untuk belajar memimpin dirinya sendiri (*leading the people to learn to lead themselves*). Dari banyak batasan ada yang memfokuskan kepada pemberdayaan individu, yang berarti suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu. Seseorang dikatakan telah *empowered* adalah ketika ia telah dapat memimpin dirinya sendiri (Syahyuti,2006:20).

CSR merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Menurut Carlzon yang dikutip Kadarisman (2012:235), “pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya.”

Lebih lanjut, Suharto (2005:58), menyatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.

Komunikasi merupakan salah satu alat yang dapat berperan penting dalam mengoptimalkan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar. Beberapa penelitian program CSR dengan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kasus di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi bahwa CSR merupakan kegiatan perusahaan membantu masyarakat dalam bidang fisik, sosial, budaya, dan atau ekonomi agar masyarakat lebih berdaya dan mandiri sehingga mereka terbantu dalam meningkatkan kesejahteraannya (Sumaryo,2009).
2. Selanjutnya, Situmeang (2012) menyatakan terdapat hubungan sangat nyata antara tingkat persepsi masyarakat dan tingkat pemberdayaan masyarakat.
3. Hasbullah (2012) menyatakan bahwa CSR Pupuk Kaltim (PKT) berperan dalam pemberdayaan ekonomi. Kemudian, analisis hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan konsep pemberdayaan ekonomi di Afrika Selatan oleh Sharlene (2012) menyatakan bahwa para pimpinan perusahaan di Afrika Selatan memberdayakan ekonomi melalui komitmen mereka dalam mengimplementasikan CSR.

Budimanta dalam Wedayanti (2019:62), menjelaskan bahwa *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat

guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada hakikatnya *community development* adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal.

Pelaksanaan program *community development* menurut AB Susanto dalam Wedayanti (2019:62), dapat dilakukan dengan siklus pengembangan komunitas yang dimulai dengan prinsip *development*, yaitu pengembangan konsep, tujuan, dan sasaran program berdasarkan *community need analysis* atau analisa kebutuhan komunitas.

Dalam melakukan analisis kebutuhan, perusahaan harus bisa memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut sifatnya harus jangka panjang dan bukan sementara. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cermat, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali ide program yang menjadi kebutuhan bersama dan bukan kebutuhan beberapa orang saja.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program ke seluruh masyarakat. Sehingga sebagai sasaran kegiatan, komunitas masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan serta keberhasilan program. Dalam proses sosialisasi tersebut harus dilakukan melalui media dengan peran komunikasi yang tepat. Selain itu kegiatan *community development* mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating* dan *belonging together*) terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam Wedayanti (2019:63), mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai suatu konsep dalam *community development* merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari *community development*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan yang dilakukan masyarakat.

Chaskin dalam Wedayanti (2019:63), mengungkapkan ciri-ciri atau indikator yang menunjukkan terjadinya upaya pengembangan masyarakat, yaitu : *a sense of community* (rasa memiliki terhadap komunitas); *a level of commitment* (tingkat komitmen); *the ability to solve problems* (kemampuan untuk memecahkan masalah); dan *access to resources* (akses kepada sumber daya).

Ada berbagai jenis kegiatan program CSR yang bisa dipilih oleh perusahaan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Untung dalam Wedayanti (2019:67), berpendapat bahwa sebenarnya tidak salah jika CSR digunakan untuk kegiatan filantropi, namun jika CSR digunakan untuk pemberdayaan masyarakat maka akan memberikan manfaat langsung dan berdampak ganda yang lebih besar serta mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat. Hal ini dikarenakan, melalui pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat dipersiapkan untuk :

- a. Menyadari kesalahannya, masalah yang dihadapi, peluang-peluang yang dapat dilakukan, serta memilih kegiatan perbaikan kehidupan yang sesuai dan terbaik dengan daya nalar serta kemampuannya.
- b. Melalui proses belajar bersama, berlatih untuk membuat perencanaan bagi perbaikan kehidupannya.

- c. Melakukan kegiatan mereka secara partisipatif dengan atau tanpa fasilitas pihak luar.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap semua kegiatan yang telah mereka lakukan.
- e. Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan secara partisipatif.

2.1.6 Konsep Pelaksanaan

Siagian dalam Raharjo (2011), berpendapat bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Selanjutnya, Nawawi (2000) berpendapat bahwa pelaksanaan adalah pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.

Sementara itu, Nurdin Usman (2002:70) dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Lebih lanjut, The Liang Gie (2003) mendefinisikan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

kemudian, Siagian (2003) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

2.1.7 Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Heinz Eulan dan Kenneth prewitt, mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dalam Zaini Ali dan Raden Imam (2015:4)

Sementara itu, Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan

berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak. Dalam Zaini Ali dan Raden Imam (2015:5)

Selanjutnya Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Senada dengan hal diatas Widodo mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dalam Zaini Ali dan Raden Imam (2015:10)

Lalu Nugroho mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dalam Zaini Ali dan Raden Imam (2015:10)

Dari beberapa penjelasan para ahli terkait definisi kebijakan publik diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat bisa berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan serta rancangan maupun peraturan pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sedang dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Thomas R. Dye dalam Pasalong (2016:39), mengatakan kebijakan publik adalah “*apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.*” Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Selanjutnya, Chaizi Nasucha dalam pasalong (2016:39), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dalam kepentingan publik.

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas empat bentuk,yaitu:

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang,

2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin,
3. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan
4. *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Wicaksono (2006:65), mengatakan bahwa terdapat lima karakteristik kebijakan publik yaitu :

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis
5. Bersifat dinamis.

Anderson dalam Nawawi (2009:13), menyebutkan bahwa ada dua belas macam jenis kebijakan, diantaranya:

1. *Substantive Policies*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau *subject matter* kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, dan hukum.
2. *Procedural Policies*, menyangkut siapa, kelompok mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang ketenagakerjaan, siapa saja dan pihak mana yang terlibat di dalamnya.
3. *Distributive Policies*, kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan *distributive* dibidang ketenagakerjaan adalah pemberian pelatihan pada angkatan kerja.
4. *Redistributive Policies*, kebijakan yang arahnya memindahkan hak pemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu. Contoh kebijakan ini memberlakukan pajak yang lebih besar dari barang-barang impor, berbeda dengan produksi dalam negeri. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
5. *Regulatory Policies*, kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Misalnya pembatasan penjualan obat-obat tertentu, pembatasan pada pemakai jalan pada jalur tertentu.
6. *Self Regulatory Policies*, kebijakan ini hampir sama dengan *Regulatory Policies*, hanya bedanya kebijakan ini didukung oleh seseorang atau kelompok orang yang punya kepentingan dengan kebijakan tersebut. Misalnya izin perdagangan, izin kerja, dan izin mengemudi dan lainnya.
7. *Material Policies*, kebijakan yang berkaitan dengan sumber martial kepada penerimanya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikan. Misalnya pemberlakuan pemberian upah minimum kepada pekerja.

8. *Symbolic Policies*, kebijakan jenis ini tidak memaksa kepada khalayak, karena dilaksanakan tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat. Sering kali kebijakan simbolis ini tidak diikuti oleh masyarakat, karena sebagai simbol saja. Misalnya kebijakan iuran TVRI, radio dan sebagainya.
9. *Collective Good Policies*, kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Jika diberikan kepada seseorang, kelompok orang, haruslah juga menyediakan untuk semua orang. Contoh kebijakan wajib belajar Sembilan tahun.
10. *Private Good Policies*, kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat/publik yang membutuhkan, tetapi masyarakat tersebut haruslah menyediakan biaya untuk mendapat layanan. Contoh kebijakan rumah sakit, tempat-tempat hitungan, rekreasi dan lainnya.
11. *Liberal Policies*, kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan. Perubahan tersebut mengarah kepada pengurangan ketidakmerataan dalam kehidupan masyarakat. Wujud dalam pemberitaan ini mengadakan koreksi atas kelemahan pada aturan yang ada pada masyarakat, serta berupaya meningkatkan program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. *Conservative Policies*, kebalikan dari kebijakan liberal. Kebijakan *liberal policies* menuntut adanya perubahan, tapi dalam kebijakan *conservative policies* malahan mempertahankan yang ada secara alamiah dan tidak direkayasa. Bahkan perubahan diupayakan diperlambat untuk perubahannya.

Thomas R. Dye (1987:328), menyatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah public tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan. Kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policy*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

2.1.8 Implementasi Kebijakan Publik

Lalu implementasi kebijakan publik, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdul Wahab (2010:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Hinggis dalam Pasalong (2016:57), mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2010:65), merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139), Implementasi Kebijakan merupakan:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan, eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menginstruksikan atau mengatur proses implementasinya.”

Model-model implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Implementasi kebijakan publik model D. Van Matter dan C. Van Horn
Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Dikatakan disini bahwa, proses implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yang disampaikan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn (1975) dalam Hill dan Hupe (2010:47) , yaitu :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan bisa diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan itu memang realistis dengan sosio kultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.
- b. Sumber Daya
Salah satu bagian penting dari keberhasilan implementasi kebijakan adalah kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain hal di atas, luas wilayah implementasi kebijakan juga harus menjadi perhatian manakala hendak menentukan agen pelaksana. Karena semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang harus dilibatkan.

- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
 - e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan salah satu mekanisme yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Apabila koordinasi antara unit-unit atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan semakin baik, maka dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.
 - f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu mendukungnya lingkungan eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Karena upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondusifnya kondisi lingkungan eksternal.
2. Implementasi Kebijakan Publik Model D. Mazmanian dan P. Sabatier
Dalam Nugroho (2012:686) Kebijakan publik model ini biasanya disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya :
- a. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, meliputi : kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendakinya.
 - b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-

lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, akses formal pihak-pihak luar.

- c. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, seperti : kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model kebijakan publik yang ditawarkan oleh Edward III (1980) dalam Agustino (2008:150) dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini, Edward III menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi
Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- b. Sumber daya
Menurut Edward III dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya: staf, informasi, wewenang, fasilitas.
- c. Disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Indikator disposisi menurut Edward antara lain, yaitu : pengangkatan birokrat, dan insentif.
- d. Struktur Birokrasi
Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Ada dua karakteristik yang disebutkan Edward III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu: *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melakukan *Fragmentasi* atau melakukan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

4. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat dalam pendekatan *top-down* yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam Tachjan (2006:56) dikenal dengan sebutan *Implementation as A Political and Administration Process*. Ada dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Pencapaian hasil akhir (*outcome*)
Pengukuran keberhasilan implementasi dilihat dari hasil akhir ini bisa dinilai dari dua hal, yaitu: (1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan; (2) Apakah

tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini dilihat dari dua faktor yaitu dampak (*impact*) pada masyarakat individu atau kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan yang ingin dilaksanakan.

b. Tingkat *Implementability* kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang kedua menurut Grindle yaitu Tingkat *Implementability* kebijakan yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* meliputi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Sedangkan *context of policy* meliputi kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

2.1.9 Konsep Pembangunan Keberlanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam Salim (2010:23), diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan.

Sementara itu Mannion dalam Zaili Rusli Adianto, dan Dadang Mashur (2020:13), menyebutkan bahwa konsep *Sustainability development* adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global.

Konsep pembangunan yang bertahan lama atau berkelanjutan pun diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Karena itu, pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah suatu keadaan hidup menjadi semakin lebih baik (Tuokuua, Kpinpuob, & Hinsonc,2019)

Sedangkan, Sudirman Phradiansah dalam Pratama (2020), mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pekerjaan perencanaan sadar yang memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas lingkungan, keselamatan, kapasitas, kesejahteraan dan kualitas hidup tidak hanya untuk orang-orang kontemporer tetapi juga untuk generasi mendatang.

Menurut Keiner (2001), pembangunan berkelanjutan adalah: “*pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dengan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi, dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan.*”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pada intinya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang didalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk

memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan. (Fauzi dan Oktavianus,2014)

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesetaraan sosial. Mohan Munasinghe (1993) dalam Roger, et. al (2008), menguraikan tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan capital.
- b. Ekologi, yaitu menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis.
- c. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Dalam perkembangannya, Keiner (2001) memperkenalkan empat dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Dimensi ekonomi
2. Dimensi lingkungan
3. Dimensi sosial
4. Dimensi institusional.

Prof.Dr.Emil Salim dalam Emil (2010:24), mengemukakan bahwa terdapat beberapa ide pokok besar terhadap pembangunan berkelanjutan yakni :

- a. Proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-menerus dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula.
- b. Sumber alam (terutama udara,air dan tanah) memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya.
- c. Kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup.
- d. Bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain dimasa depan.
- e. Pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi , sehigga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi

kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Secara rinci dalam Nurlita Pertiwi (2017:20), program *Sustainability development goals* terbagi atas enam komponen yaitu :

1. *Planet* atau perlindungan ekosistem untuk seluruh masyarakat
2. *People* atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi wanita dan anak-anak
3. *Dignity* atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan
4. *Prosperity* atau membangun kemandirian dan transformasi energi
5. *Justice* atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang didukung dengan kelembagaan yang kuat
6. *Partnership* atau mengkatalisasi solidaritas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta pengkajian oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait relevansi, perbedaan, persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Berikut ialah penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai sumber referensi, yaitu:

1. **Putri Ariani (2018). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara. Universitas Sumatera Utara.**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program *corporate social responsibility* di PT PLN (Persero) yang berbentuk program bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumut dilakukan dalam bentuk bina lingkungan. Program yang dilaksanakan adalah kemitraan, pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pendidikan. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan CSR PT PLN (Persero) adalah dengan menggunakan mixed type.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan CSR oleh PT PLN (Persero) adalah keberlanjutan, tanggung jawab dan keterbukaan. Program kemitraan termasuk dalam kategori Community Development dan program community development termasuk dalam kategori Community Philanthropy .

Evaluasi program CSR adalah pimpinan terlibat dalam pelaksanaan program CSR. Proporsi bantuan ditetapkan sebesar 0,5% untuk program kemitraan dan 0,5% untuk program pengembangan masyarakat. Transparansi ialah pelaporan kegiatan CSR setiap tiga bulan sekali.

Cakupan wilayah ialah masyarakat disekitar perusahaan. Monitoring yang dilakukan telah maksimal, karena seluruh program terlaksana dengan baik. Pelibatan stakeholder ialah pada program kemitraan. Hasil nyata dibuktikan dengan mitra binaan yang sudah berhasil mandiri.

2. **Abidea Bima Ramdani et al., (2019). *Implementasi Corporate Social Responcibility (CSR) PT Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang. Ejournal administrasi negara. Universitas Mulawarman, vol 7, No 2, Halaman 6781-6806.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait Implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Kaltim Kampung Melahing Kota Bontang dan untuk mengetahui Faktor penghambat, serta faktor pendukung yang dihadapi PT Pupuk Kaltim Bontang dalam implementasi CSR. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Fokus penelitian untuk implementasi CSR yakni ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Kaltim Kampung Melahing Kota Bontang. Dalam tujuan kebijakan terkait program CSR memiliki landasan dalam pelaksanaan implementasi program CSR pemberdayaan masyarakat melalui *social mapping*.

Implementasi program CSR dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui pelatihan budidaya rumput laut serta meningkatkan kapasitas SDM melalui Unit Kewirausahaan Bersama. Dalam meningkatkan sumber daya manusia PT Pupuk Kaltim bekerja sama dengan pemerintah sebagai pendukung untuk pelaksanaan program CSR di Kampung Melahing.

Lalu dalam pelaksanaan program CSR pemberdayaan masyarakat, PT Pupuk Kaltim sangat komunikatif dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai

dengan kebijakan yang berorientasi pada tujuan perusahaan serta produktif dan kontributif dalam membangun mitra kerja terhadap suatu daerah, yang terlaksana dalam bentuk pelatihan untuk masyarakat Kampung Melahing untuk pembangunan infrastruktur.

3. Ilhamdi Prayadi Putra (2017). Implementasi Corporate Social Responcibility (CSR) bidang Empowerment PT Pertamina RU II Dumai. Jom FISIP, Universitas Riau, Vol 4, No 2, Hal 1-11.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Pertamina RU II Dumai pada Program Pemberdayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HUMAS PT Pertamina RU II Dumai telah melakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan program CSR Pemberdayaan seperti: Pertama, perusahaan melakukan pemetaan wilayah dengan *social mapping* melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti universitas. Kedua, dalam melaksanakan program CSR Perusahaan bekerjasama dengan beberapa mitra seperti PNPM Mandiri dan LPMK. Ketiga, evaluasi program dilakukan oleh PT Pertamina RU II Dumai dengan mitra kerja dari pelaksana kegiatan CSR. Terakhir, hasil evaluasi akan dilaporkan ke kantor pusat lalu dipublikasikan untuk laporan tahunan yang

dapat diakses secara umum. Pelaksanaan CSR selalu mengacu pada tiga aspek triple bottom line oleh John Elkington yaitu people, profit, dan planet.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Ariani	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responcibility</i> (CSR) pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.	Sama-sama penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.	Lokasi penelitian terdahulu di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, sedangkan penelitian ini di PT Pertamina RU II Dumai. Penelitian terdahulu berfokus terhadap keseluruhan program CSR yang dilaksanakan perusahaan, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan satu program CSR yaitu Kampung Minapolitan.
2	Abidea Bima Ramdani, Fajar Apriani, Santi Rande.	Implementasi <i>Corporate Social Responcibility</i> (CSR) PT Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang.	Jenis penelitian sama-sama penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Lokasi penelitian terdahulu di PT Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang, sedangkan penelitian ini di PT Pertamina RU II Dumai.

3	Ilhamdi Prayadi Putra.	Implementasi <i>Corporate Social Responcibility</i> (CSR) bidang <i>Empowerment</i> PT Pertamina RU II Dumai.	Sama-sama penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian sama yaitu di PT Pertamina RU II Dumai.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Pertamina RU II Dumai, sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai pada Program Pengembangan Kampung Minapolitan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program.
---	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

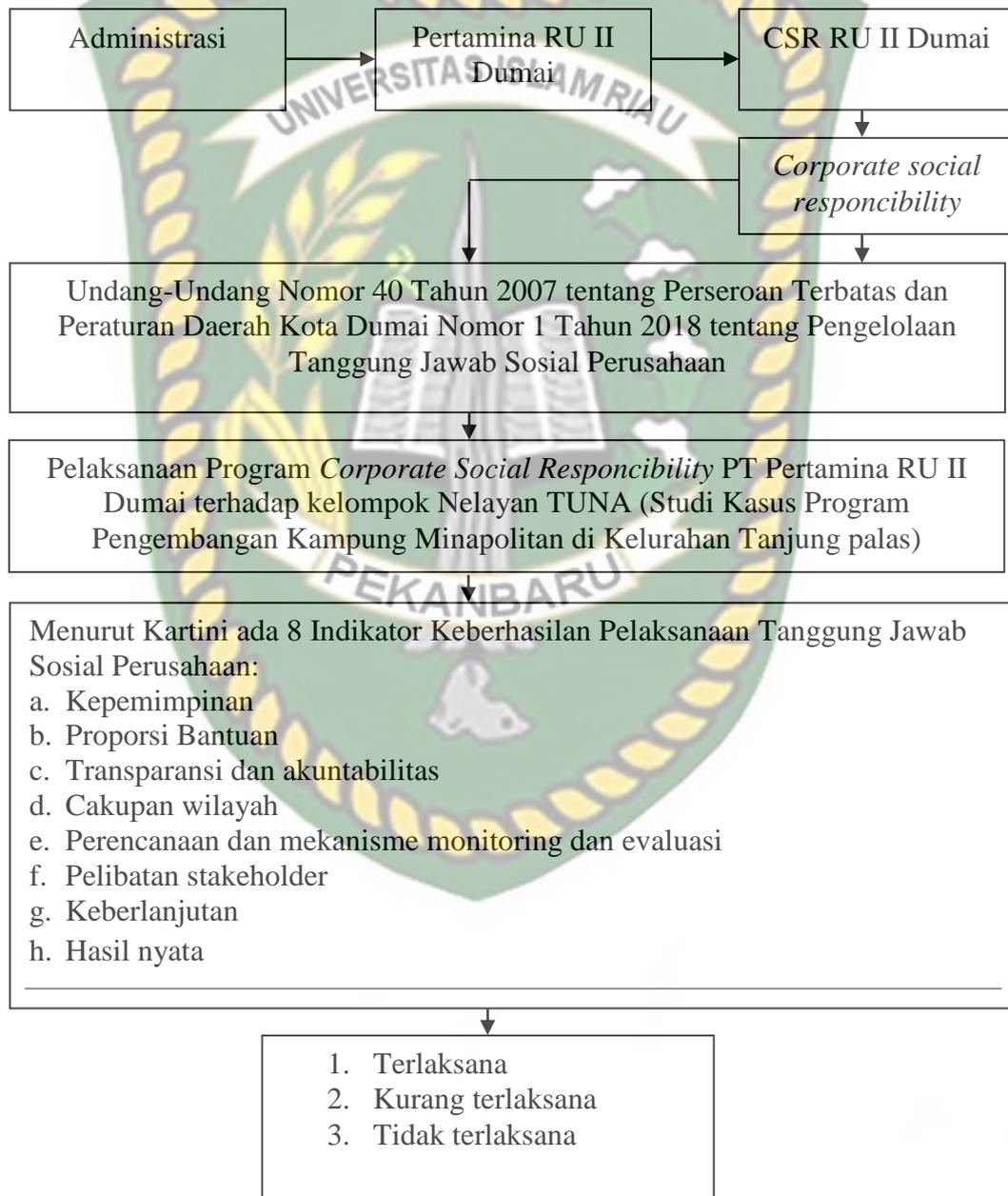
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.3 Kerangka Pikir

Adapun skema kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)



Sumber : Olahan Penulis, 2022

2.4 Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengkaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.
3. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.
4. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.
5. *Corporate social respncibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan mekanisme bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan maupun sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum.

6. Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya
7. Pelaksanaan adalah pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.
8. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).
9. Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.
10. Implementasi kebijakan Publik merupakan Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan, eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
11. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan.

12. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumber daya.
14. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional.
15. Proporsi bantuan adalah skala ukuran atau kisaran anggaran sesuai dengan tingkat serapan maksimal perusahaan.
16. Transparansi adalah harus jelas dana ditujukan untuk siapa dan alasan pemberian dana tersebut.
17. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
18. Cakupan wilayah adalah identifikasi penerima manfaat terhadap program.

19. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi adalah adanya pelibatan stakeholder dalam pelaksanaan program.
20. Pelibatan stakeholder adalah terdapatnya koordinasi antara tiga stakeholder, perusahaan, pemerintah dan masyarakat.
21. Keberlanjutan adalah adanya kelangsungan dimasa depan terhadap program yang dilaksanakan.
22. Hasil nyata adalah adanya hasil maupun terjadinya perubahan akibat program.



2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Konsep	Variabel penelitian	Indikator	Item penilaian
Menurut Kartini ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran untuk kinerja kunci dalam pelaksanaan CSR, yaitu : 1. <i>Leadership</i> (kepemimpinan) 2.Proporsi bantuan 3.Transparansi dan Akuntabilitas 4.Cakupan wilayah (<i>coverage area</i>) 5.Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi 6.Pelibatan stakeholder (<i>stakeholders engagement</i>) 7.Kerberlanjutan (<i>Sustainability</i>) 8.Hasil nyata (Outcome)	Pelaksanaan <i>Corporate sosial responcibility</i>	1. <i>Leadership</i> (Kepemimpinan)	1.Adanya dukungan dari pimpinan perusahaan. 2.Adanya kesadaran filantropi dari pimpinan perusahaan
		2.Proporsi bantuan	1.Kesesuaian tingkat serapan perusahaan dengan program 2.Kesesuaian anggaran perusahaan dengan program
		3.Transparansi dan Akuntabilitas	1.Terdapat laporan tahunan 2.Adanya pertanggung jawaban atas keberlanjutan program
		4.Cakupan wilayah	1.Ketepatan wilayah penerima program 2.Ketepatan penerima program
		5.Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi	1.Adanya jaminan pelibatan multi stakeholders 2.Adanya upaya mengawasi keberlanjutan program 3.Adanya pembaharuan terhadap evaluasi

		6. Pelibatan stakeholder	<p>1. Adanya mekanisme koordinasi dengan <i>stakeholders</i></p> <p>2. Adanya mekanisme yang menjamin partisipasi <i>stakeholders</i> dalam evaluasi</p>
		7. Keberlanjutan	<p>1. Kesesuaian program dengan kebutuhan.</p> <p>2. Adanya progress program yang lebih baik.</p>
		8. Hasil nyata	<p>1. Adanya dampak nyata dari program.</p> <p>2. Adanya manfaat nyata dari program.</p>



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan yang sekarang ini terjadi atau ada.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (studi kasus program pengembangan kampung minapolitan).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam Pasalong (2020:9) diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu:

1. Peneliti menemukan fenomena terkait dengan Program Pengembangan Kampung Minapolitan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Dumai, di Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Tanjung Palas merupakan Kelurahan yang paling dekat dengan PT Pertamina RU II Dumai, yang mana sedikit banyaknya mereka merasakan dampak dari kegiatan operasional perusahaan.
2. Alasan Peneliti memilih PT Pertamina RU II Dumai dalam penelitian karena PT Pertamina RU II Dumai sebagai organisasi publik yang mengelola dana publik.
3. Alasan peneliti memilih program pengembangan kampung minapolitan daripada program CSR lainnya adalah karena konsep pengembangan kampung minapolitan sangat bagus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir dibidang perikanan dan didalam konsep minapolitan terdapat aktivitas ekonomi dari hulu-hilir untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
4. Program pengembangan kampung minapolitan di Tanjung Palas merupakan kampung minapolitan pertama di Kota Dumai, tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan di Tanjung Palas sebagai kawasan bisnis perikanan di Kota Dumai.

Alasan diatas menjadi dasar bagi peneliti dalam memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini.

3.3 Key Informan dan Informan

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih key informan dan informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Key Informan dan Informan

No.	Key Informan dan Informan	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Dumai (Key Informan)	1
2	Ketua Kelompok Nelayan TUNA (Informan)	1
3	Anggota Kelompok Nelayan TUNA (Informan)	5
4	Ketua RT 02 Kelurahan Tanjung Palas (Informan)	1
5	<i>Community Development Officer</i> RU II Dumai (Informan)	1
6	Lurah Tanjung Palas (Informan)	1
7	Camat Dumai Timur (Informan)	1
8	HUMAS Forum TJSP (Informan)	1
9	Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai (Informan)	1
10	Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai (Informan)	1

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

Berdasarkan dari tabel 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Key Informan dalam penelitian ini yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yang

diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, alasan peneliti memilih Dinas tersebut karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai sebagai penanggung jawab teknis dan ahli di bidang Perikanan, adapun Informan dalam penelitian yakni Ketua kelompok Nelayan TUNA, Anggota Kelompok Nelayan TUNA, Ketua RT 02 Tanjung Palas, CDO RU II Dumai, Lurah, Camat, HUMAS Forum TJSP Kota Dumai, Anggota DPRD Kota Dumai, dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis dan sumbernya yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber data dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai pelaksanaan program *corporate social responcebility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (Studi kasus program pengembangan kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas).
2. Data sekunder yaitu data penelitian yang didapatkan dari perusahaan terkait, berupa dokumen-dokumen laporan program pengembangan kampung minapolitan. Data sekunder yang didapatkan dari buku-buku serta penelitian ilmiah yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab kepada key informan dan informan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan pelaksanaan program *corporate social responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (Studi kasus program pengembangan kampung minapolitan dikelurahan Tanjung Palas)

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati fenomena yang terjadi dilapangan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dengan konteks (hal-hal yang terjadi disekitarnya) sebagai proses pencarian makna. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap program pengembangan kampung minapolitan yang dibentuk oleh PT Pertamina RU II Dumai untuk kelompok nelayan TUNA.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan terkait permasalahan yang diangkat.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2020:130) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Setelah semua data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan secara metode ilmiah.

3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA (Studi kasus program pengembangan kampung minapolitan dikelurahan Tanjung Palas) adalah sebagai berikut:

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT/Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																							
		September-Oktober				November				Desember				Januari				Februari-April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Draft wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Penelitian Skripsi																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan hasil penelitian ini dapat dituangkan dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Berisi Konsep-Konsep, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, dan Operasional Variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Key Informan dan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian, dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisi Pembahasan Tentang Penggambaran Umum Tentang Situasi Dan Kondisi Mengenai Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Permasalahan Yang Akan Ditulis Oleh Peneliti Mengenai Pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).

BAB VI PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran Dari Hasil Penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tanjung Palas berada di Kecamatan Dumai Timur yang merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Dumai pada Kota Administratif Dumai dan dengan terbentuknya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maka Kota Administratif menjadi Kotamadya Dumai yang dulunya jumlah Kecamatan terdiri 3 (tiga) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan.

Pada saat sebelum dilakukan pemekaran Kelurahan, Kecamatan Dumai Timur terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, kemudian dengan diterbitkannya PERDA Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2001 maka wilayah Kelurahan di Kecamatan Dumai Timur telah dimekarkan dari 6 (enam) Kelurahan menjadi 9 (sembilan) Kelurahan, Kemudian berubah berdasarkan PERDA Nomor 8 tahun 2009 tentang pemekaran Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Kecamatan Dumai Timur mempunyai batas-batas Wilayah Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Kampai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa (Kabupaten Bengkalis);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur.

Kecamatan Dumai Timur mengalami perkembangan penduduk yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya tingkat migrasi dan urbanisasi penduduk yang

ingin mencari pekerjaan, karena di Kecamatan Dumai Timur terdapat beberapa lapangan kerja seperti industri pertambangan minyak bumi, daerah pelabuhan besar, pengolahan minyak sawit, perhotelan, pusat perekonomian serta perdagangan. Adapun total jumlah penduduknya sebanyak 59.688 Jiwa.

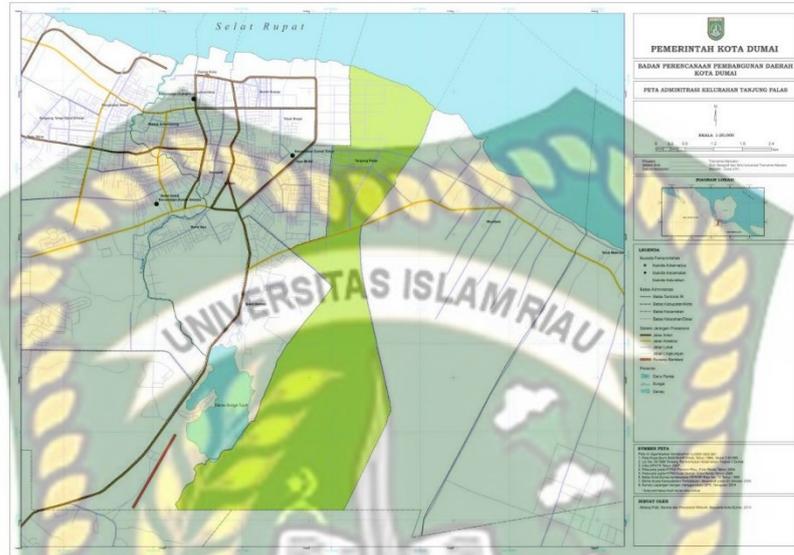
Kecamatan Dumai Timur mempunyai luas wilayah 48.6 KM² yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yang meliputi :

1. Kelurahan Jaya Mukti	3.9	Km ²
2. Kelurahan Bukit Batrem	2	Km ²
3. Kelurahan Teluk Binjai	12.2	Km ²
4. Kelurahan Buluh Kasap	4.5	Km ²
5. Kelurahan Tanjung Palas	26	Km ²

Sejarah Tanjung Palas dahulunya banyak terdapat tumbuhan sejenis pohon palas dan dikarenakan geografis daerah tersebut menjorok ke laut maka dikatakan Tanjung berdasarkan PP No. 8/1971. Secara geografis Kelurahan Tanjung Palas adalah kelurahan yang dengan luas wilayah 26 Km² yang dalam wilayahnya Pusat Industri Kilang Minyak Pertamina RU II Dumai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Buluh Kasap
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mundam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Batrem
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jaya Mukti

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Tanjung Palas



Kelurahan Tanjung Palas merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Dumai Timur. Kepala daerah sebelumnya disebut Penghulu, kemudian berganti menjadi Lurah. Kepemimpinan Kepala Daerah di Kelurahan Tanjung Palas dimulai sejak tahun 1950-1975 yang dikepalai oleh Penghulu, kemudian dilanjutkan dengan Lurah dari tahun 1981- sekarang.

4.2 Visi dan Misi Kelurahan

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Tanjung Palas untuk mendukung visi dan misi kota Dumai yakni ‘‘Mewujudkan Kelurahan Kelurahan Tanjung Palas Menjadi Kelurahan yang Prima dalam Pelayanan serta memberdayakan masyarakat dalam kehidupan Bergotong Royong’’

Adapun Misi dari Kelurahan Tanjung palas yakni Sebagai Berikut:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan yang prima dalam pelayanan prima dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

2. Peningkatan Profesionalisme aparat dalam memberikan pelayanan prima dalam masyarakat dalam bentuk inovatif, kreatif dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, aman dan kondusif serta berbudaya melayu

Misi diatas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan tatanan pada masyarakat yang menginginkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan , adanya aparatur yang bersih, terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, pemenuhan kebutuhan public itu di jadikan misi yang hendak dicapai oleh kelurahan tanjung palas, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas public sebagai salah satu pilar dari *Good governance*, Bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi, pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh kelurahan tanjung palas dengan mengimplementasikan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian pelayanan yang baik , cepat dan efisien kepada masyarakat.

4.3 Demografi Kelurahan

4.3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Palas

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Palas

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah keseluruhan
1	Laki-laki	4.875 Jiwa	9.475 jiwa
2	Perempuan	4.600 Jiwa	

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Tanjung Palas Desember 2021

4.3.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat kelurahan Tanjung Palas

Jenis Pekerjaan secara umum masyarakat kelurahan Tanjung palas dapat dilihat Dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	165 jiwa
2	Pelajar atau Mahasiswa	1098 Jiwa
3	Berdagang	4 jiwa
4	Nelayan	23 Jiwa
5	Buruh Nelayan Perikanan	6 Jiwa
6	Petani	36 Jiwa
7	Belum Bekerja	4388 jiwa

Sumber : Data Agregat Kependudukan (DAK) 2020 Disdukcapil Kota Dumai

4.3.3 Klasifikasi Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas

Klasifikasi Pendidikan Terakhir secara umum masyarakat kelurahan Tanjung palas dapat dilihat Dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Klasifikasi Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	1497 Jiwa
2	SLTP	1130 Jiwa
3	SLTA	2647 Jiwa
4	Diploma	275 Jiwa
5	Strata 1-3	386 Jiwa

Sumber : Data Agregat Kependudukan (DAK) 2020 Disdukcapil Kota Dumai

4.3.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Palas

Kelurahan Tanjung Palas wilayahnya berdekatan dengan kawasan pabrik-pabrik yang menyebabkan terdapatnya polusi udara atau limbah maupun debu melalui asap-asap pabrik yang dikeluarkan oleh proses olahan minyak bumi. Jumlah sarana kesehatan yang berada di kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Palas

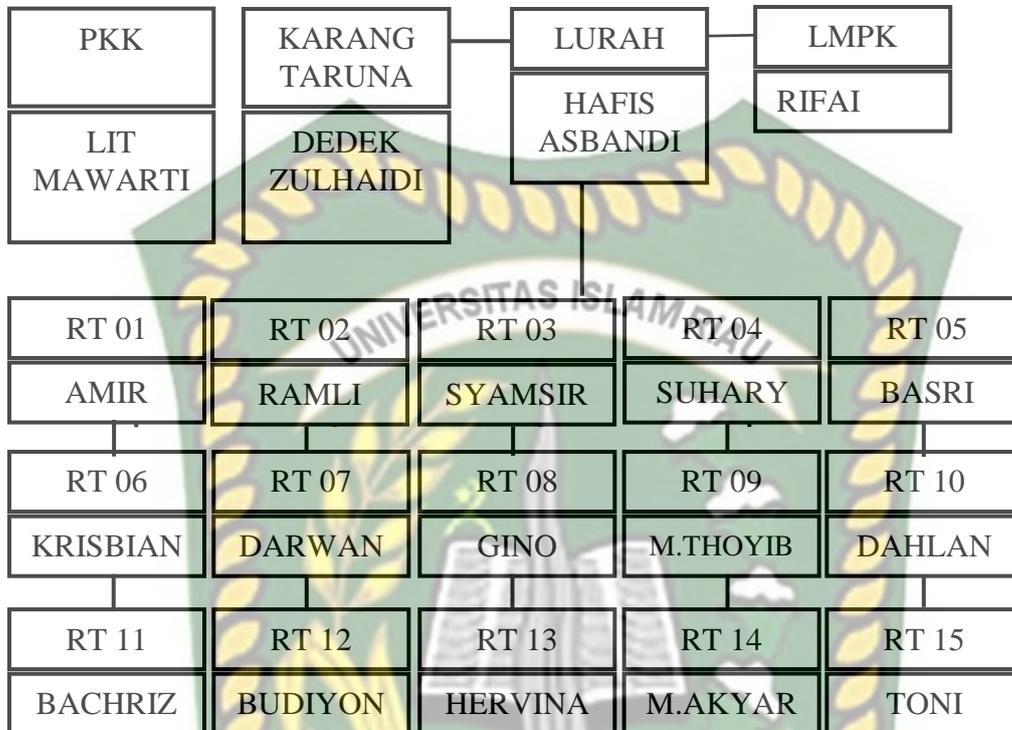
No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Poliklinik	-
3.	Posyandu	5
4.	Bidan Desa	1

Sumber : Data Kelurahan Tanjung Palas 2018

4.4 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Palas

Dalam Menjalankan Dan Fungsinya, Lembaga kemasyarakatan dikelurahan haruslah berkoordinasi dengan lurah karena Lembaga kemasyarakatan adalah perpanjangan tangan lurah dalam melaksanakan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat , berikut Struktur Organisasi Kelurahan tanjung palas:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi kelurahan Tanjung palas

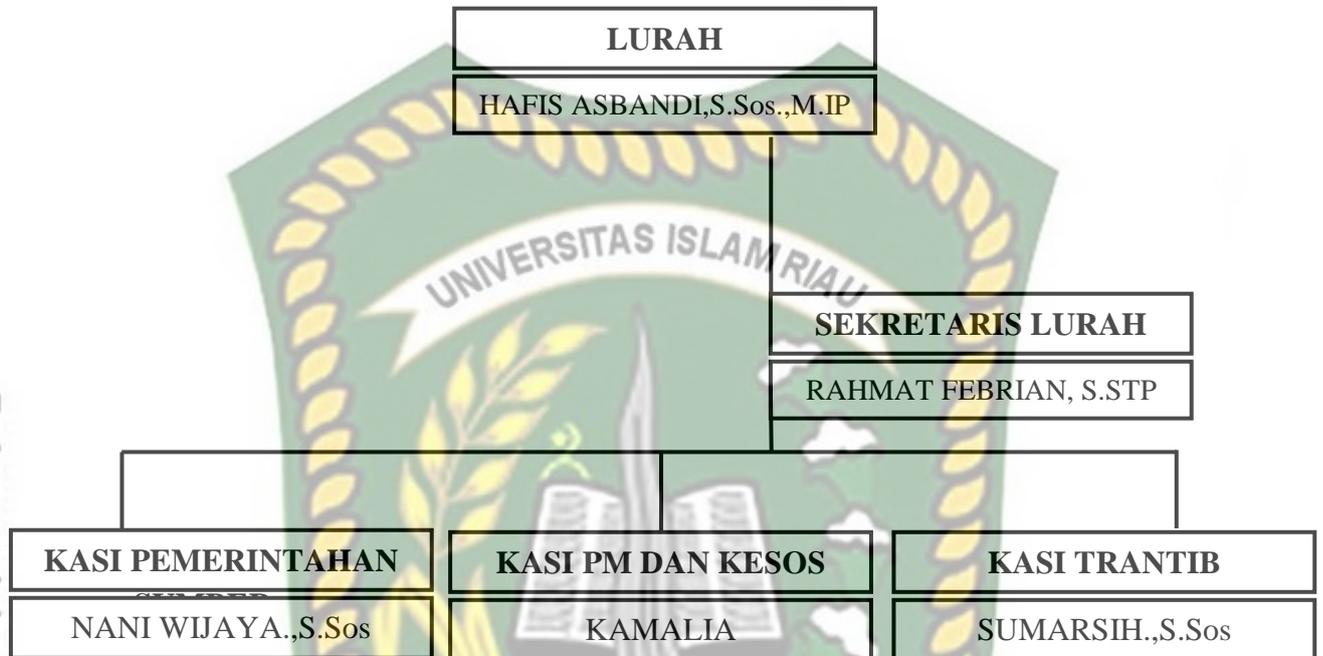


Sumber : Data Kelurahan Tanjung Palas Tahun 2021

4.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Tanjung Palas

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kantor lurah juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai kinerja yang baik demi tercapainya visi dan misi Kelurahan Tanjung palas , adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Tanjung Palas adalah Sebagai Berikut:

Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Tanjung Palas



Sumber : Data Kelurahan Tanjung Palas Tahun 2021

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penyajian Data Hasil Penelitian

5.1.1 Identifikasi Key Informan dan Informan

Penelitian ini melibatkan Key Informan dan Informan yang dianggap memahami keadaan maupun permasalahan yang diteliti dan memberikan interpresntasi terhadap objektivitas dalam penelitian “Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai Terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)”. Identitas dalam penelitian ini dideskripsikan dalam 5 klasifikasi yakni Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pekerjaan. Klasifikasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas serta mampu mendukung data dari penelitian ini. Tingkat Umur, Tingkat Pendidikan, dan Klasifikasi Pekerjaan juga mempengaruhi jawaban dan informasi yang diberikan, melihat dari tingkat kedewasaan dalam menjawab dan tingkat wawasan dalam menjawab serta tingkat tanggung jawab dalam memberikan jawaban dan informasi yang benar adanya.

Adapun Identitas Key Informan dan Informan yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1 Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1	Isroyanti, S.Pi.,M.Si	Perempuan	47 Tahun	S2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai
2	H. Johannes MPT, S.H.,MM	Laki-laki	48 Tahun	S2	Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai
3	Mukhammad Fatkhullah, S.Sos., M.Kesos	Laki-laki	28 Tahun	S2	CDO (Community Development Officer) PT Pertamina RU II Dumai
4	Zainur, S.H	Laki-laki	52 Tahun	S1	Camat Dumai Timur
5	Hafis Asbandi, S.Sos., M.IP	Laki-laki	44 Tahun	S2	Lurah Tanjung Palas
6	Rifa'i Hasbi	Laki-laki	50 Tahun	D1	Sekretaris Majelis Kerapatan Adat
7	Soni Fajar Mahmud, S.Sos.,M.Si	Laki-laki	52 Tahun	S2	HUMAS Forum TJSP Kota Dumai
8	Ramli	Laki-laki	58 Tahun	SD	Ketua RT 02 Tanjung Palas
9	Dahlan Zainudin	Laki-laki	46 Tahun	SLTP	Ketua Nelayan TUNA
10	Ariyanto	Laki-laki	48 Tahun	SLTP	Anggota Nelayan TUNA
11	Syahrudin	Laki-laki	56 Tahun	SD	Anggota Nelayan TUNA

12	Anasri	Laki-laki	58 Tahun	SD	Anggota Nelayan TUNA
13	Alwijaya	Laki-laki	32 Tahun	SLTA	Anggota Nelayan TUNA
14	Rozali	Laki-laki	26 Tahun	SD	Anggota Nelayan TUNA

Sumber : Modifikasi Peneliti dari Hasil Wawancara 2022

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi *Key Informan* yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini yakni DPRD Kota Dumai yang dalam hal ini diwakilkan oleh salah satu Anggota DPRD Komisi III, CDO (*Community Development Officer*) PT Pertamina RU II Dumai, Camat Dumai Timur, Lurah Tanjung Palas, LAMR Kota Dumai yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Kerapatan Adat yang mana Sekretaris MKA tersebut juga sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas, Forum TJSP Kota Dumai yang dalam hal ini diwakilkan oleh Humas dari Forum TJSP Kota Dumai, Ketua RT 02 Tanjung Palas, Ketua Kelompok Nelayan TUNA, serta Anggota Kelompok Nelayan TUNA yang dalam hal ini diwakilkan oleh 5 orang Anggota Nelayan TUNA.

5.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Pada pembahasan dalam bab ini, diuraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas). Peneliti mendapatkan data berupa Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa Narasumber yaitu Key Informan dan Informan. Adapun Key Informan yakni Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Informan dalam penelitian ini yakni Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai, *Community Development Officer* RU II Dumai, Camat Dumai Timur, Lurah Tanjung Palas, Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai, Humas Forum TJSP Kota Dumai, Ketua RT 02 Tanjung Palas, Ketua Kelompok Nelayan TUNA, serta 5 orang dari Anggota Kelompok Nelayan TUNA dianggap menjadi data primer, dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi dari PT Pertamina RU II Dumai, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, dan Kelurahan Tanjung Palas berupa data, struktur organisasi, rencana strategis, dan lainnya.

Wawancara terfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber yang mendukung penelitian terhadap permasalahan yang ditemukan yakni terfokus kepada Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA

(Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas).

Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara meliputi indikator yang sesuai dengan Pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) yang berupa Variabel penelitian yang menjadi landasan dari konsep penelitian yakni meliputi:

1. Leadership (Kepemimpinan)

Menurut James Black dalam Beddy Iriawan Maksudi (2018:96) mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu.

Melihat sejauh mana kepemimpinan Birokrasi atau fasilitator antara Perusahaan dan Kelompok Nelayan TUNA dalam melaksanakan serta mendukung pelaksanaan program CSR PT Pertamina RU II Dumai, dan melihat sejauh mana dari kepemimpinan perusahaan menyatakan secara sadar bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responcibility* penting bagi kelangsungan perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/ibu apakah Program CSR PT Pertamina RU II

Dumai terutama Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas mendapat dukungan dari pimpinan perusahaan dan Pemerintah Daerah?’, Beliau mengatakan:

“Kalau itu dapat dukungan, karena Pertamina juga koordinasinya ke kita, sebelum melaksanakan Kampung Minapolitan yang di Tanjung Palas mereka meminta data ke Dinas, pasti program mereka mendapat dukungan dari pemerintah” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Setiap program TJSP yang merupakan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, setiap yang mereka lakukan selama itu untuk kepentingan masyarakat itu pasti mendapat dukungan” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* PT Pertamina RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor Communication Relation & CSR RU II Dumai, beliau mengatakan :

“Iya Mendapat dukungan, salah satu bentuk dukungannya yaitu dana, serta arahan-arahan , kira-kira koor bisnis atau knowledge apa yang bisa kita transfer untuk kampung minapolitan ini, bentuk dukungannya seperti itu, lalu dari segi social mapping, pengukuran-pengukuran, kajian-kajian itu juga didukung oleh pimpinan perusahaan, pemerintah juga mendukung program ini” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau dukungan dari pimpinan mereka pasti ada, kalau sebagai camat apa pun kegiatan yang ada di wilayah kita pasti didukung, selagi untuk kepentingan orang banyak dan positif tentu didukung. Karena saya masih baru disini, jadi belum ada memfokuskan kesana, dari pihak mereka juga belum datang atau

kita survey kesana itu belum, tapi pihak kecamatan pasti mengetahui” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022

Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“Dapat dukungan karena itu sudah kewajiban, setiap perusahaan itu wajib melaksanakan CSR, jadi kalau mereka mengeluarkan program CSR pasti didukung” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“Dukungan itu pasti dapat. Mereka mau membantu, tetapi yang mereka bantu tidak semurni yang kita harapan, namun apa pun niat baik mereka pasti di dukung” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“Dari pimpinan perusahaan tentu mendapat dukungan untuk program yang dijalankan sama mereka, tetapi dukungan dari pemerintah saya kurang tahu juga” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau dari pimpinan perusahaan mendapat dukungan, pemerintah juga mendukung, tahun ini pun kami mendapat bantuan juga dari pemerintah, hanya saja belum terlaksanakan, tetapi kita sudah memasukan proposal, nama kita yang di atas, Kalau tidak ada pemotongan dana-dana covid, kita akan mendapat bantuan 2 pompong” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Dukungan itu tentu dapat, Perusahaan seperti Pertamina ini kan pasti didukung sama perusahaan dan pemerintah” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Dukungan itu pasti dapat dari pimpinan perusahaan, makanya program ini dapat berjalan, pemerintah kota juga mendukung program ini.” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Kalau Dukungan itu memang ada, Pernah juga waktu penyerahan bibit ikan pimpinan perusahaan datang kesini, Dari orang pemerintahan juga hadir” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Dapat dukungan, Apa pun yang ingin mereka laksanakan tentu atas persetujuan dari pimpinan mereka, Karena ini program perusahaan pasti didukung sama pimpinannya, Pemerintah juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pertamina, Tahun pertama kami dapat bantuan ini banyak juga orang pemerintahan yang hadir” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Pimpinan perusahaan pasti mendukung setiap program-program mereka, karena sebelum dijalankan program pasti mereka diskusi terlebih dahulu, Dari pemerintah juga mendapat dukungan seperti dari Dinas Perikanan” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah Pimpinan Perusahaan memiliki kesadaran filantropi, yang dijawab oleh dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“Kalau itu persisnya saya kurang tahu juga, Tetapi sekarang ada dana CSR yang mereka arahkan ke kelompok masyarakat yang ada disana berarti ada kepedulian atau kesadaran dari mereka terhadap masyarakat yang tinggal disekitar kilang” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Apa pun ceritanya memang harus punya kesadaran itu, Siapa pun yang menduduki jabatan itu di Pertamina baik di pusat maupun di daerah harus mempunyai kesadaran itu, Sampai saat ini mereka sudah banyak juga membantu masyarakat di sekitar mereka” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II, Beliau mengatakan:

“Kesadaran itu tentu ada, sebenarnya Kampung Minapolitan ini kami yang menginisiasi dan mengusulkan, Kita sebenarnya dana CSR itu ada dua yang pertama CSR yang kita rancang, Yang Kedua CSR yang disini kami menyebutnya Bina Lingkungan ke masyarakat. Dan untuk Kampung Minapolitan itu murni inisiasi dari kami, Kami ada social mapping setiap empat tahun sekali, Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ada di masyarakat dan kami mengelaborasi permasalahan tersebut supaya tidak

terjadi permasalahan lagi dan bisa menguntungkan perusahaan dan masyarakat” (Wawancara 4 Februari 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Kampung minapolitan itu termasuk program CSR Pertamina, Mereka membuat Program CSR pasti karena adanya kesadaran dari mereka maka dari itu program tersebut ada dan berjalan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“Selama beberapa bulan saya disini memang ada kesadaran itu, Ada program-program CSR yang mereka lakukan termasuk Kampung Minapolitan ini” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“Kesadaran itu ada, Yang jelas dalam aturan CSR Perusahaan itu harus ada, Tanjung Palas seluruhnya ada beberapa bantuan CSR Pertamina, Termasuk Kelompok Nelayan TUNA mereka bantu dengan jaring, kolam-kolam lele, Cuma tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kesadaran dari mereka saya rasa ada, karena mereka ada kasih bantuan-bantuan ke masyarakat tapi tidak menyeluruh, Hanya masyarakat yang memiliki Kelompok saja, seperti Kelompok Nelayan, Kelompok Tani” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“Ya itu tergantung dari pengusulan kami, Karena ini dana perusahaan jadi sesuai dengan program CSR nya, Misalnya tahun ini apa saja yang akan dibantu dan dibina, Dari sekian persen dana CSR pertamina tersebut dibagikan untuk bantuan-bantuan ke kelompok usaha tani, nelayan, ternak dan sebagian untuk pembangunan infrastruktur” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kalau kesadaran itu ada, Yang sudah kami terima ini dapat dikatakan bentuk dari kesadaran mereka” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Kesadaran dari mereka ada, Contohnya bantuan-bantuan ini yang sudah mereka berikan kepada kami dalam 3 tahun ini, Walaupun belum sepenuhnya dibantu tetapi ada yang mereka berikan untuk kami “ (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Rasa kami ada kesadaran itu, Walaupun bantuan yang diberikan memang tidak sepenuhnya, Namun bantuan itu tetap ada” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Karena ada program CSR dari mereka, Anggaran juga dari mereka, Menurut saya ada kesadaran mereka untuk membantu masyarakat disekitar kilang, Karena kami yang paling dekat dengan Perusahaan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Beberapa tahun ini, Menurut saya kesadaran itu ada dari mereka, 2 tahun ini baru ada bantuan-bantuan dari Perusahaan ke Kelompok kami. Dulu Pertamina itu susah sekali, Dari tahun 90an Pertamina berdiri disini,Baru beberapa tahun belakangan ini mau membantu” (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil Observasi peneliti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Forum TJSP yang dibentuk masih belum terlaksana karena pengelolaan TJSP yang dilakukan oleh Forum TJSP belum berjalan sehingga program CSR yang dijalankan oleh Perusahaan tidak diketahui oleh Forum TJSP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pelaksanaan program *corporate social responcebility* PT Pertamina RU II Dumai mendapat dukungan dari pimpinan perusahaan dan juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan program kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas, dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk melaksanakan program

tersebut, Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk setiap kegiatan ataupun program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kegiatan yang dilakukan juga positif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai untuk Program Pengembangan Kampung Minapolitan tidak diketahui pelaksanaannya oleh Forum TJSP karena Forum TJSP Kota Dumai belum berjalan sesuai dengan PERDA Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan TJSP, namun program kampung minapolitan ini mendapat dukungan dari pimpinan perusahaan dan juga pemerintah setempat. Dukungan dari pimpinan perusahaan berbentuk dana dan arahan-arahan yang diberikan terkait dengan program yang dijalankan, sedangkan Pemerintah Daerah seperti Camat, Lurah, mendukung program ini dalam bentuk izin yang diberikan untuk pelaksanaan program kampung minapolitan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai mendukung dalam bentuk pemberian data-data kelompok nelayan TUNA dan pembinaan-pembinaan yang diberikan untuk kelompok Nelayan TUNA, Sehingga disimpulkan terlaksana karena program CSR tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dan juga Pimpinan Perusahaan, serta pimpinan perusahaan dari PT Pertamina RU II Dumai memang memiliki kesadaran filantropi, hal ini dibuktikan dengan adanya program-program CSR yang dijalankan oleh Perusahaan.

2. Proporsi Bantuan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 mengatur bahwa setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana PT berkewajiban menjalankan CSR yakni PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responcibility* kesesuaian serapan perusahaan dengan program CSR yang dijalankan harus diperhatikan. Didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Bab III pasal 9 disebutkan bahwa 2% dari laba perusahaan untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang menjadi tatanan umum praktis pelaksanaan CSR. Pelaksanaan TJSP pun haruslah sesuai dengan Laba yang didapatkan oleh perusahaan (UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,kecil dan menengah).

Peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah sesuai antara besarnya serapan perusahaan dengan program CSR yang dijalankan terutama Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas?”, Beliau mengatakan :

“Kalau besarnya serapan dari Pertamina ini tentu sangat besar, Sementara Program Kampung Minapolitan ini hanya seperberapa dari mereka saja, Memang CSR itu disebarkan mereka ke banyak sektor, Bukan hanya sektor perikanan saja, Tetapi di sektor perikanan hanya sebatas yang menurut

mereka itu sudah cukup, Jadi sebatas itu yang mereka berikan ke kita.” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Kalau saya bilang belum, Karena sampai hari ini juga mereka belum transparan, tidak ada satu pun perusahaan termasuk Pertamina mau mengakui berapa profit mereka. Seharusnya CSR itu, dikeluarkan dari profit sehingga Berimbang, Hari ini kalau ditanya sudah sesuai atau belum, jawabannya belum. Mereka tidak transparan, memang kesadaran itu ada, Tetapi yang keluar itu belum sesuai” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos pada 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II Dumai, beliau mengatakan :

“Sebenarnya perusahaan dari tiga tahun terakhir ini rugi, jadi meskipun kami rugi, kami harus mengeluarkan CSR, Karena di aturan sudah ada 2% dari keuntungan perusahaaa untuk CSR, Sedangkan perusahaan ini tergolong rugi dalam melakukan bisnis perusahaan, Karena kita juga dibebankan harga, Harga jualnya juga di atur oleh undang-undang dan tidak boleh melebihi dari itu, padahal kita tahu minyak sekarang lagi naik-naiknya, Kita terpaksa menjual di range harga yang sudah ditentukan, Dan itu membuat kami mengalami kerugian, Tapi meskipun rugi kami tetap melakukan program CSR, Jadi menurut saya sesuai dengan kondisi seperti ini, kami tetap menjalankan program” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau serapan pertamina tentu sangat besar, Dan Program CSRnya itu bukan hanya kampung minapolitan ini saja, Ada yang lain juga dan untuk Dumai juga ada, Dengan mereka menggelontorkan dana, membuat pakan, memberikan bibit ikan berarti sesuai untuk kampung minapolitannya” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kita sendiri tahu bahwa serapan dari Pertamina ini besar, Kampung Minapolitan ini kan hanya salah satu dari program CSR mereka, Berapa besar dana yang mereka alokasikan untuk CSR kita tidak tahu, Kalau ke kita hanya komunikasi saja”(Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“Tidak sesuai, jauh sekali dari kata sesuai. Mereka harus menyatakan secara terbuka berapa satu tahunnya CSR untuk Tanjung Palas, Supaya kami yang menjalankan program itu, Mereka memang membantu, tetapi belum sesuai” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau sesuai itu, Pasti tidak sesuai. Kami pun tidak tahu, Berapa dana CSR untuk setiap tahunnya, mereka tidak hanya membantu kami saja, sementara kami yang paling dekat dengan Kilang, setiap hari kami menghirup abu kock dari Pertamina. Selama saya menjadi RT, Baru RT 02 ini mendapat bantuan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau itu jauh tidak sesuai, Karena setahu saya Pertamina ini mulai tahun 90an kalau tak salah, Baru selama 4 tahun belakangan ini Pertamina membantu warga di Tanjung Palas ini. Baru 4 tahun ini semenjak sudah kami

dobrak habis-habisan dulu. Itu lah baru ada kesadaran dari pihak pertamina”
(Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kalau dipikir-pikir memang tidak sesuai, jauh sekali. Kalau orang kami bilang dibagi 3 ¼ bagi pun tak ada” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Kalau sesuai tentu sangat tidak sesuai, Pertamina ini kan besar sekali serapannya, Belum sebanding dengan yang dikasih ke kami, Kami ini kan paling dekat dengan orang tuh, hanya 500 meter, obor kilang itu panas nya sampai sini” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Sangat tidak sesuai, yang mereka kasih itu belum ada apa-apanya sama dampak yang kami rasakan tiap hari disini, kalau musim angin barat , hitam semua ini lantai-lantai rumah, karena debu Kock, pendapatan mereka itu banyak, sementara bantuan ini baru seperberapa kan”
(Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Kalau sesuai itu belum, karena anggaran yang diberikan itu masih terbilang kecil dibandingkan dengan serapan perusahaan setiap harinya. Dana CSR ini sama sekali tidak ada apa-apanya sama besarnya serapan mereka setiap hari, pendapatan mereka besar, hanya saja mereka tidak terbuka berapa seharusnya CSR yang dikeluarkan setiap tahunnya, tertutup pertamina itu” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Sangat jauh dari kata sesuai, karena serapan pertamina ini sangat besar, sedangkan CSR untuk program kami ini, dananya sedikit sekali, bahkan dari tahun ke tahunnya dana yang cair semakin sedikit, sehingga kami perlu memutar otak untuk mengolah nya. Tahun pertama itu 100 juta, tahun kedua 62 juta, dan ini tahun ketiga baru keluar 48 juta” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah sesuai antara anggaran yang dikeluarkan perusahaan dengan program CSR yakni Kampung Minapolitan yang dijalankan oleh perusahaan?”, yang dijawab oleh dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Kalau sejauh ini sesuai, sesuai dengan jumlah kelompok yang mereka bantu, tetapi kita harapkan lebih lagi dari itu, mereka sekarang Cuma membantu satu kelompok, kita harapkan mereka mau juga membantu kelompok-kelompok yang lainnya lagi dengan jumlah yang lebih besar, itu yang kita harapkan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Kalau hari ini mereka keluarkan misalnya anggaran untuk program ini, linier dia, tetapi kalau ditanya mampukah anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, belum. Karena tergantung jumlahnya, kalau jumlahnya misalkan 2 milyar tetapi dia hanya bantu 100 juta berartikan belum maksimal dia, sama halnya dengan program ini, program ini belum mampu menyelesaikan masalah di masyarakat, anggaran yang dibantu itu tidak maksimal”(Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor Communication Relation & CSR RU II, Beliau mengatakan:

“Tidak sesuai sebenarnya dari kita sendiri sebagai pelaksana itu kurang, tapi ya Mau bagaimana lagi, karena kita rugi dan kita juga dibatasi dari pusat anggarannya, sehingga ya mau tak mau ya harus terima” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau kita namanya menunggu CSR, tentu tidak penuh mutlak, kalau mengharapkan itu tentu tidak sesuai. Mereka juga mempunyai budget, karena yang namanya CSR itu kan bukan hanya satu tempat, tetapi banyak tempat” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan negara, pengolahan minyak ini tentu orang memandangnya besarkan, jadi kita juga kurang jelas berapa anggaran-anggarannya, karena memang mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat”(Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Apa yang kita ajukan proposal masyarakat tidak semuanya terpenuhi, mereka mengajukan anggaran sekian untuk melaksanakan program itu, tetapi yang dikeluarkan sangat jauh dari yang diajukan, tidak terpenuhi, alasan mereka anggaran” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau anggaran itu jelas tidak sesuai, anggaran yang mereka berikan hanya sedikit. Apalagi makanan ikan sekarang mahal, jadi menurut saya tidak sesuai” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Tidak sesuai, karena yang kita ajukan umpamanya 100 juta, yang dikeluarkan itu Cuma 60-70% , tidak sampai 100%. Tidak sesuai dengan keinginan yang kita minta, alasan mereka itu karena dananya tidak mencukupi, karena ada yang lain yang harus dibantu” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau itu belum sesuai, yang jelas kami ini nelayan, tak perlu kami dibantu dengan bantuan budidaya, jangan dulu. Tetapi tak mau mereka, Dia lebih kuat ke budidaya , sementara kami ini kan seperti sekolah lagi dikasih pelatihan, ini lah banyak yang terkendala, banyak yang tak jadi, padahal penyuluhan ada, yang jelas kami ini bisa fokusnya ke nelayan ini lah, sebabnya nelayan ini bisa mencukupi kehidupan kami. Dana dari mereka itu tak banyak dan itu pun harus dibagi lagi untuk nelayan dan budidaya, jadi sedikit sekali alhasil di nelayan tak oke, di budidaya pun gagal karena kurang dana” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Kalau anggaran yang orang tuh keluarkan belum sesuailah, karena yang kami ajukan di proposal, tidak sepenuhnya cair, contohnya tahun ini tahun ke

tiga kami dapat Cuma 48 juta, sangat jauh dari permohonan kami” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Anggaran itu tak sesuai, anggaran yang cair kan tak sepenuhnya, kami minta berapa, hanya berapa persen saja yang mereka keluarkan, kami terima saja nama nya dibantu, kalau tak diterima tak dapat sama sekali” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Anggaran jelas tidak sesuai, makanya program ini tak berkembang karena kurang dana, di bagi-bagi dananya, jadi tak maksimal. Dana yang didapat untuk perbaikan kapal, beli alat tangkap, sama budidaya. kalau Dana yang sedikit itu difokuskan ke nelayan saja, tanpa harus budidaya mungkin berkembang, kalau ini kekurangan jadi tak maksimal. Yang untuk dinelayan dapatnya sedikit, budidaya pun sedikit, jadi hasilnya tak sesuai harapan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Anggaran itu tak sesuai, untuk nelayan saja dana itu masih kurang, belum sepenuhnya tercukupi, dana yang cair tak sepenuhnya untuk nelayan saja, ada usaha budidaya, dibagi lagi berapa persen untuk nelayan, berapa persen untuk budidaya. Kalau dananya kecil, tentu pembagiannya kecil juga kan” (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai, Perusahaan hanya memberikan program CSR kepada masyarakat yang memiliki kelompok atau komunitas,

sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kelompok atau komunitas tidak mendapatkan program CSR.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber pelaksanaan *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai, Perusahaan telah mengeluarkan CSR meskipun Perusahaan sedang mengalami kerugian, untuk proporsi bantuan masih berlandaskan pada kemampuan Perusahaan dalam mengeluarkan dana CSR, dana CSR yang dikeluarkan oleh Perusahaan tidak sesuai dengan pengajuan kelompok nelayan TUNA, dalam pelaksanaan program kampung minapolitan Perusahaan hanya mengeluarkan dana CSR sebesar kemampuan perusahaan, namun PT Pertamina RU II Dumai tidak hanya mengeluarkan CSR untuk sektor Perikanan saja, tetapi di beberapa sektor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai, Perusahaan mengakui telah memaksimalkan dana CSR meskipun Perusahaan mengalami kerugian, Akan tetapi berbanding terbalik dengan informasi yang diberikan oleh beberapa informan lainnya menyebutkan bahwa Program CSR yang dikeluarkan oleh Perusahaan hanya untuk beberapa kelompok masyarakat saja, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kelompok tidak mendapatkan program CSR, berdasarkan PERDA Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau, bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber

daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya, namun Perusahaan dirasa tidak begitu mengeluarkan sepenuhnya dana program meskipun program yang dikeluarkan tidak hanya dibidang perikanan akan tetapi masih banyak jenis-jenis program CSR dari PT Pertamina RU II Dumai dan dari beberapa pihak merasa pengajuan dana CSR kebanyakan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program kampung minapolitan, para pelaksana program pun menyadari ketidakcukupan dana yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan program, hal ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program CSR oleh PT Pertamina RU II Dumai kurang terlaksana karena berdasarkan keterangan dari Pihak Perusahaan bahwa meskipun Perusahaan sedang mengalami kerugian pada bisnisnya, PT Pertamina RU II Dumai tetap menjalankan program CSR dibeberapa bidang sesuai dengan kemampuan perusahaan, namun dari segi anggaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan program Kampung Minapolitan ini anggaran yang dikeluarkan relatif kecil dan tidak sesuai dengan pengajuan kelompok sasaran, PT Pertamina RU II Dumai juga masih menutupi akan porsi bantuan yang seharusnya diberikan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berkaitan dengan pelaporan aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal. Crowther David (2008:204) menyatakan :

“Transparency, as principle, means that the eksternal impact of the actions of the organisation can be ascertained from that organisation as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organisation, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation’s reporting mechanism”

Artinya prinsip transparansi berarti dampak eksternal dari aktivitas organisasi dapat diketahui dari pelaporan organisasi dan tidak ada fakta yang disembunyikan dalam pelaporan tersebut. Dampak eksternal perusahaan harus jelas bagi semua pihak, dengan menggunakan informasi yang berasal dari mekanisme pelaporan organisasi tersebut.

Transparansi merupakan suatu hal yang penting bagi pihak eksternal, yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman informasi, dan pertanggungjawaban terhadap berbagai dampak dari lingkungan.

Sedangkan akuntabilitas merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas diperlukan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan pada pihak eksternal dan internal (Crowther & David, 2008). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media perusahaan dalam membangun *image* dan *network* terhadap pemangku kepentingan.

Selain harus adanya laporan tahunan dari program CSR yang diberikan oleh perusahaan yang telah dilaksanakan selama satu periode, haruslah terdapat akuntabilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam memastikan terlaksananya program CSR sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*.

Saat bertanya kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah dalam pelaksanaan program pengembangan kampung minapolitan perusahaan memiliki dan menyampaikan laporan tahunan dari program tersebut?”, Beliau mengatakan :

“Kalau laporan ke kita sepertinya belum, belum ada sampai sekarang. Tetapi dari Dinas tetap melakukan pembinaan disana, jadi pembinaan itu untuk mengecek program itu berhasil atau tidaknya, kalau mereka mungkin ada laporannya, tetapi belum ada tembusannya ke Dinas sampai sekarang” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Jujur saja sampai hari ini PERDA itu kami usung 2018, karena kami ingin tahu sebenarnya perusahaan ini sudah sejauh apa kontribusinya terhadap masyarakat. Artinya kami ingin perusahaan tadi melaporkan sehingga kami tahu, dalam satu tahun itu, mana sih yang perlu kita reward seperti penyederhanaan perizinan,dan lainnya.Tapi sampai hari ini belum ada pelaporan itu” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos pada 4 Maret

2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II

Dumai, beliau mengatakan :

“Pasti ada, kalau dari kita sendiri itu laporannya untuk internal kita sendiri, tetapi kalau misalkan pemerintah daerah ada yang minta, kita akan berikan karena menyangkut ada data-data sensitif perusahaan, kita tidak bisa sembarangan, kalau pemerintah ingin mengetahui, mereka juga harus ada administrasinya, setidaknya kalau misalkan data itu keluar kita tahu siapa saja yang mengakses data tersebut” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni

Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau laporan evaluasi itu mungkin mereka menyampaikan laporannya ke pusat, karena mereka BUMN, kalau laporan ke pemerintah tidak ada, pemerintah daerah ini hanya memperhatikan saja” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis

Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022

Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“Saya belum tahu, karena ditempat saya dulu tidak ada perusahaan-perusahaan seperti ini, jadi tidak pernah bersentuhan langsung dengan hal seperti ini” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat

LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung

Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari

2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Laporanannya hanya untuk mereka sendiri, yang jelas apa program mereka, mereka jalankan terus membuat laporan untuk perusahaan laporannya, apakah mereka menyerahkan laporan tersebut ke PEMKO pun saya tidak tahu“ (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB,

Beliau menyebutkan:

“Kalau perusahaan itu ada bagian CSRnya, jadi laporannya mereka yang membuatnya. Orang itu turun ke lapangan, jadi mereka tahu, tapi kalau untuk laporan itu kami juga kurang tahu disampaikan kemana laporannya, mungkin ke pusat sana. Banyak sebenarnya bantuan dari Pertamina ini yang tidak tepat sasaran” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57

WIB, Beliau mengatakan:

“Laporan tahunannya itu ada, dari tim lapangan ke perusahaan, dari perusahaan cabang ke perusahaan pusatnya. Setiap laporan itu akan dikirim ke pusat. Akan diseleksi di pusat, terus kalau memang ini kelompoknya berjalan dengan bagus, maka tahun depan akan dibantu lagi” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kalau laporan tahunan itu orang tuh, langsung ke pusatnya. Jadi kami pun tidak tahu disampaikan atau tidak laporan itu ke Pemerintah” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Kalau laporan tahunan mungkin orang tim lapangan mereka ada, untuk disampaikan ke manajer perusahaan, lalu ke pusat sana disampaikan, Pertamina ini kan perusahaan negara jadi langsung ke pusat” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Rasa kami adalah kalau laporan tuh, orang lapangan yang kasih laporan ke perusahaan pusat sana” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Kalau tim lapangan mereka pasti melaporkan ke perusahaan bagaimana jalannya program ini, keadaan di lapangan pasti dibuat laporannya sama mereka, tetapi disampaikan kemana saja laporan tersebut kami kurang tahu juga” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Saya rasa laporan itu dari tim lapangan mereka ke perusahaan itu ada, nanti perusahaan melapor ke pusat, karena mereka ada tim lapangannya yang kunjungan kesini, bagaimana pelaksanaan dilapangan itu dipantau sama tim lapangan mereka” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah perusahaan dalam menjalankan program pengembangan kampung minapolitan adanya pertanggungjawaban atas keberlanjutan program tersebut?”, yang dijawab oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Kalau itu belum ada kejelasan, karena yang punya anggaran mereka, CSR nya dari mereka, jadi kita pun tidak tahu apakah nanti mereka kedepannya

akan membantu lagi atau tidak. Jadi semuanya tergantung mereka, Karena program itu dananya dari mereka” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Secara aturan mereka harus berkelanjutan, harus berkesinambungan, mereka konsen, artinya Pertamina jalan terus. Tapi kita tidak tahu dia kemana saja” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor Communication Relation & CSR RU II, Beliau mengatakan:

“ Pertanggung jawaban untuk keberlanjutan program, setiap program yang kami lakukan pasti kami akan atur strategi, kami istilahnya memiliki road map lima tahun, jadi setiap program-program besar memiliki road map rencana dari awal sampai tahun kelima, di tahun kelima kita hanya tinggal memantau saja , jadi kita tidak lagi mengeluarkan dana, di tahun keempat kita fokus ke kelembagaan agar mereka bisa mandiri dan berkelanjutan. Jadi memang tidak ada program yang dirancang untuk di suap, kita sudah memutuskan terkait dengan keberlanjutannya bagaimana, bagaimana kita bisa melepas mereka agar mereka bisa berdiri, meskipun kita tidak bantu dana” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau itu tergantung dari hasil evaluasi, kalau menurut Pertamina bagus, maka bisa saja dilanjutkan. Pasti itu ada interaksi antara kedua belah pihak, pemberi CSR dan Kelompok Nelayan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Jelas, setiap kegiatan yang mau dilakukan saya rasa pertanggung jawabannya itu ada, tidak ada bedanya dengan pemerintahan. Mereka pasti juga tidak mau kalau program mereka sia-sia” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Pertanggung jawaban itu ada sampai lima tahun, biasanya program-program pertamina ini sampai lima tahun, setelah lima tahun nanti tergantung keputusan mereka mau dilanjutkan atau tidak” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau ceritanya kemarin, kami sebagai yang dibantu ini, bagus tak bagusnya sampai lima tahun. Nanti Sudah sampai lima tahun dipindahkan ke yang lain lagi” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Pertanggungjawaban itu sampai lima tahun, jadi dalam masa lima tahun kita dibina oleh Pertamina, dengan bantuan dana, jadi kalau tidak bisa dibangun oleh Pertamina, maka mereka menyerah. Kalau berhasil programnya kemungkinan bisa dilanjutkan, tapi kalau tidak berhasil cukuplah sampai lima tahun” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Ada tuh ada, mereka bilang kami ini dibina dan dibantu sampai lima tahun, kedepannya kami pun tidak tahu, Tapi nanti lah tunggu tanggal mainnya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Program ini kan untuk lima tahun, nanti setelah lima tahun kami pun tak tahu akan berlanjut atau tidak, kalau program ini berhasil bisa jadi berlanjut, tetapi kami takut juga karena yang sudah-sudah bisa dibilang gagal seperti kolam ikan itu, takutnya mereka tak mau bantu lagi, karena tak ada hasil” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Program ini pun kami tidak tahu berlanjut atau tidak untuk kedepannya, katanya sampai lima tahun dibantu, tapi kami ragu juga, karena yang sudah diberikan tak berkembang, jadi sia-sia tuh , tetapi kita lihat nanti lah macam mana” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Untuk program ini kami dibantukan untuk lima tahun, dari tahun 2018 , setelah lima tahun nanti kami sendiri pun tak tahu akan berlanjut atau tidak, setelah lima tahun kalau tak ada hasil dilepas sama orang tuh, cukup lima tahun saja” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Katanya kami ini dibantu untuk waktu lima tahun, tapi kami belum tahu tahun depan seperti apa, apakah mereka masih mau membantu atau tidak, tahun depan memang belum lima tahun, tetapi untuk budidayanya kan tak

berkembang, kami pun tak tahu tahun depan orang tuh masih mau bantu atau tidak, syukur-syukur memang betul sampai lima tahun” (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai, perusahaan bersifat tertutup terhadap laporan pelaksanaan program CSR yang dijalankan, Perusahaan juga tidak menyampaikan laporan pelaksanaan CSR kepada Pemerintah Daerah , dan tidak adanya laporan pelaksanaan program kampung minapolitan ini di DPRD Kota Dumai karena perusahaan tidak menyampaikan laporan tersebut, sedangkan didalam PERDA Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau disebutkan bahwa setiap Perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP, dan laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, perusahaan memiliki laporan tahunan untuk internal perusahaan, sedangkan pertanggungjawaban untuk keberlanjutan program CSR perusahaan mengatur strategi dan sudah memiliki *road map* untuk lima tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program CSR PT Pertamina RU II Dumai, pada indikator Transparansi dan Akuntabilitas hanya berada pada tingkat internal Perusahaan dan Pemerintah Pusat saja, untuk Pemerintah Daerah sendiri, masih terlihat kurangnya

koordinasi terhadap pelaporan yang dimana pelaporan tersebut akan diberikan apabila diminta saja dan hanya sebatas pelaporan secara umum, sehingga keterikatan perusahaan dengan pemerintah daerah tidak begitu terikat untuk pelaporan yang bahkan bisa mempertegas akan pelaksanaan dan pertanggung jawaban Dari program itu sendiri dan dari beberapa infroman juga di dapati hanya pelaporan tim lapangan dari internal perusahaan saja, tidak adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat itu sendiri, dan untuk akuntabilitas Perusahaan memiliki jangka waktu khusus yang diberikan untuk pelaksanaan program yang diberikan yakni 5 tahun, apabila 5 tahun telah dimaksimalkan dengan baik program tersebut akan berlanjut sesuai dengan hasil yang didapatkan dari program tersebut dimana setiap tahunnya telah di setting sesuai dengan *road map* yang telah ditentukan agar setelah terbantunya masyarakat dengan program CSR diharapkan ditahun berikutnya masyarakat bisa lebih mandiri dan hanya melanjutkan pengembangan program lainnnya saja, yang tentunya masyarakat harus mampu mengelola dengan baik bantuan program CSR itu sendiri agar tercapainya tujuan program yang diinginkan oleh perusahaan dan terbantunya pemerintah secara kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi kemampuan dan perekonomian dari sini peneliti bisa dikatakan bahwa pelaksanaan transparansi dan Akuntabilitas kurang Terlaksana dikarenakan dari segi akuntabilitas Perusahaan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dari program kampung minapolitan ini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan dalam kurun tersebut kelompok nelayan TUNA menjadi mitra binaan PT Pertamina RU II Dumai,

namun dari segi transparansi PT Pertamina RU II Dumai tidak menyampaikan laporan tahunan dari program kampung minapolitan ini kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui sejauh apa program ini berdampak untuk masyarakat yang dibantu, laporan tahunan tersebut hanya untuk internal perusahaan saja.

4. Cakupan Wilayah

Ring merupakan wilayah yang berkemungkinan mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan CSR yang mempunyai tingkatan. Menurut Soemanto (2007:45), penentuan Ring tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Ring 1 adalah daerah yang menerima dampak paling besar, Ring 2 adalah daerah yang menerima dampak menengah, Ring 3 adalah wilayah yang menerima dampak paling kecil atau sama sekali tidak ada dampak.

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, Perusahaan harus memahami wilayah mana saja yang terkena dampak langsung dan dampak tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan yang harus mendapatkan *Corporate Social Responsibility*, dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan CSR yakni Program Pengembangan Kampung Minapolitan sesuai dengan wilayah operasi perusahaan dan wilayah yang membutuhkan program tersebut?”, beliau mengatakan :

“Kalau yang dia bantu memang sekarang itu masyarakat di dekat kilang putri tujuh, karena disitu juga ada nelayan, baru sebatas itu sih bantuannya,

mungkin karena masyarakat nelayan yang ada hanya disitu tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka akan memberikan ke kelompok-kelompok yang lain, jadi menurut saya sesuai lah” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Sebenarnya untuk wilayah operasi itu di Tanjung Palas, memang tidak semua, Tetapi kalau ditanya soal itu, mereka clear lah, kalau dikatakan untuk lingkungan yang seharusnya clear artinya ada ring. Bahkan yang diluar itu pun mereka bantu, itu kalau Pertamina ya. Cuma itu kita lihat sendiri, tapi laporannya tidak ada” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos pada 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II Dumai, beliau mengatakan :

“Iya kalau dari Minapolitan sendiri itu terletak di Tanjung Palas, yang kebetulan ring 1, Tetapi masyarakat Tanjung Palas sendiri menyebutnya ring 1/2 karena benar-benar perbatasan, jadi kalau wilayahnya sendiri menurut saya cukup sesuai, dan sesuai memang membutuhkan program. Karena kita sendirikan masalah di Kampung Minapolitan itu terkait dengan koor bisnis kita juga, jadi kita mencoba dengan kampung minapolitan ini bagaimana sih caranya mengurangi masyarakat ngokang ini tanpa harus terlihat menggusur mereka, jadi kita berikan alternative pekerjaan baru yaitu dengan kampung minapolitan ini, jadi kita menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan dan di masyarakat juga” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau sesuai pasti sesuai, karena mereka satu lingkungan , betul-betul wilayah sepadan, Tanjung Palas dan Pertamina hanya berbatasan dengan pagar saja” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“Kita kan disini ada 4 kelurahan, Bahasanya kita ini ring satu, bahkan ring ½ lagi karena dekatnya. Saya rasa mereka sudah dipersiapkan matang-matang sebelum memberi bantuan” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“Wilayah operasi sesuai karena kita wilayah ring 1, memang sudah seharusnya kita yang diprioritaskan, dan memang membutuhkan program CSR dari pertamina ini. Tetapi yang dibantunya itu kan belum mampu memenuhi kebutuhan yang kita harapkan” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“Tidak sesuai, karena program ini tidak merata yang mendapatkan bantuan ini, sedangkan KK kami dalam 1 RT ini 100 lebih hampir 200, jadi mereka hanya mengambil kelompok-kelompoknya saja” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau berdasarkan wilayah operasi perusahaan, Sesuai lah menurut saya karena kami ini memang diwilayah ring 1, tetapi kalau wilayah yang membutuhkan program kurang sesuai karena kami ingin dibantu untuk nelayan tanpa harus ada budidaya karena tak jalan untuk usaha budidaya disini” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dengan Wilayah operasi perusahaan memang sudah sesuai, tetapi Kalau wilayah yang membutuhkan program dirasa-rasa belum sesuai karena tidak sepenuhnya tadi, dirangkapnya. Kami butuhnya fokus ke Nelayannya kalau bisa kami nih jangan di bagi untuk budidaya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Kalau wilayah operasi kami ini memang nelayan paling dekat dengan Pertamina ini kan, sebenarnya kami memang membutuhkan program ini, tetapi kalau sepenuhnya yang dibantu itu untuk nelayan, tak dibagi-bagi dengan budidaya, karena untuk budidaya disini rasa kami tak cocok, cuaca panas karena dekat kilang” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Kami ini memang wilayah ring 1, dapat program ini kan karena kebetulan untuk kelompok nelayan di Tanjung Palas ini memang kami yang paling dekat dengan wilayah orang tuh” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Kalau wilayah operasi perusahaan memang kami ini yang paling dekat sama kilang, dan kelompok kami juga butuh dibantu sama mereka tetapi program mereka itu kurang sesuai untuk mencukupi kebutuhan kami” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Kami ini memang paling dekat sama wilayah operasi mereka, dan diwilayah kami ini juga banyak kelompok-kelompok usaha yang butuh bantuan, seperti usaha nelayan, Jadi pertama ini dia mau membantu itu kalau sudah ada wujud nya, kalau kita sudah ada aksi terlebih dahulu baru mereka mau membantu, kalau tidak ada wujud nya tidak mau mereka membantu” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah Kelompok Nelayan TUNA tepat sebagai penerima dari program CSR yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas?” , yang dijawab oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“Tepat karena rekomendasi dari kita. Kita mengarahkan untuk pemberian bantuan itu memang kepada kelompok yang betul-betul mau menerima terus mau melaksanakan dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Jadi kita yang merekomendasikan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“ Sebenarnya kalau bicara menentukan program yang tepat apa, kalau dibilang dia kelompok nelayan TUNA. seharusnya kan diklarifikasi dulu, sebenarnya yang tepat disitu itu apa. Harusnya jelas, apa yang ada dikelompok nelayan TUNA ini, apa sih programnya. kami miss kami tidak tahu, Seharusnya mereka menginformasikan dan mereka bisa melihat dari program pemerintah yang tidak tersalurkan di daerah situ apa yang cocok” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II, Beliau mengatakan:

“ Sesuai, karena kelompok nelayan TUNA ini merupakan salah satu nelayan tangkap disana dan agar mereka bisa tetap nelayan , mereka butuh melaut jauh diluar perairan Dumai, Jadi kita gunakan program kampung minapolitan ini agar mereka lebih efektif dan efisien dalam melakukan menangkap ikan diluar perairan Dumai” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau CSR sudah diluncurkan kesana berarti sudah tepat, penilaian perusahaan tidak mungkin salah, mereka tidak akan memberikan itu kalau tidak tepat. Mereka sudah berikan, artinya mereka sudah tahu bahwa itu tepat” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Cocok lah karena mereka profesinya sebagai Nelayan, Tetapi berapa jumlah Nelayan di kelurahan kita saya belum tahu, nanti akan saya survey ke lapangan langsung” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Memang sudah tepat, tetapi sebaiknya tidak hanya nelayan saja, ada peternak kambing disana, ada kelompok-kelompok tani, kampung minapolitan itu seharusnya tidak hanya terfokus kepada nelayan saja. Jadi masyarakat

yang tidak punya kelompok itu tidak dapat apa-apa” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB,

Beliau menyebutkan:

“ Kalau pendapat saya memang bagus kelompok nelayan TUNA ini sebagai penerima program ini, karena mereka mengajukan proposal dan sudah di survey juga sama orang Pertamina ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu

Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau kita sebagai penerima memang tepat, karena satu-satunya kelompok yang ada di tetangga mereka itu lah kelompok kami, kalau kelompok-kelompok lain itu memang jauh dari mereka. Jadi yang seharusnya diutamakan itu kelompok ini ” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA

yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Memang cocok, Cuma kalau untuk budidaya disini, belum Nampak hasil yang dibantu. Saya rasa memang tak bisa sebetulnya disini untuk budidaya, Karena disini dekat kilang. Jadi kami ini apa yang diberikan ya diterima ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA

yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Rasa kami memang sudah tepat, karena kami ini Nelayan yang paling dekat. Kampung Minapolitan ini kan berbasis perikanan, cocok lah kalau memang yang dapat program ini kelompok Nelayan ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Sudah tepat kalau sebagai penerima program, bagian CSR mereka turun ke lapangan langsung, mungkin dilihatnya juga kami nih cocok untuk dapat program Kampung Minapolitan ini ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Tepat, karena kami mengajukan proposal ke Pertamina, membutuhkan dana sekian-sekian, terus diseleksi dulu sama pihak CSRnya, dan menurut mereka kami ini layak diberi bantuan, jadi kami yang dapat ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Kalau kami ini tepat, karena kelompok nelayan yang aktif yang berada disekitar mereka, waktu itu bagian CSR turun lapangan terlebih dahulu, melihat kondisi usaha nelayan kami ini, mereka memastikan bahwa kami ini memang benar-benar ada kelompoknya ” (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan program Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas yang dilakukan oleh PT Pertamina RU II Dumai memang sudah sesuai dengan wilayah operasi perusahaan karena Kelurahan Tanjung Palas dan Kilang Pertamina RU II Dumai hanya berbatasan dengan pagar perusahaan dan biasanya masyarakat setempat menyebutnya dengan ring $\frac{1}{2}$, namun tidak seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Palas menerima Program tersebut, program CSR

yang dilaksanakan PT Pertamina RU II Dumai hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kelompok usaha bersama.

Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, Pelaksanaan program kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas sesuai dengan wilayah operasi perusahaan dan wilayah yang membutuhkan program tersebut dikarenakan Tanjung Palas merupakan wilayah ring 1 yang menjadi wilayah prioritas pelaksanaan CSR, dan kelompok Nelayan TUNA yang menjadi sasaran dari program kampung minapolitan merupakan kelompok Nelayan yang berada di sepadan Kilang Pertamina RU II Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan pelaksanaan program CSR PT Pertamina RU II Dumai, Dalam Cakupan wilayah sudah sesuai ketepatan akan pelaksanaan dari program CSR tersebut dikarenakan PT. Pertamina RU II Dumai yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tanjung Palas yang bisa dikategorikan sebagai Ring 1 dimana Kawasan yang merupakan sebuah prioritas karena terkena dampak langsung akan keberadaan perusahaan itu sendiri, sedangkan tentang Ketepatan pelaksanaan program, masih terjadinya miss koordinasi dan Komunikasi yang dirasa sebagai bentuk tolak ukur keterlibatan stakeholder dimana program CSR yang seharusnya juga memberikan dampak terhadap kemudahan pemerintah dalam pengembangan masyarakat akan tetapi dengan adanya miss komunikasi pemerintah tidak mendapati laporan pelaksanaan dari program tersebut, sehingga tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah apakah program tersebut tepat dan pemerintah

terbantu dengan adanya program tersebut, Namun informan lain menyatakan bahwa masyarakat yang menerima program kampung minapolitan ini merasa terbantu dikarenakan pekerjaan masyarakat yang melaut terasa lebih mudah dan efektif karena bantuan yang diterima oleh kelompok TUNA, berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan pada indikator cakupan wilayah terlaksana dikarenakan perusahaan telah melaksanakan program kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas yang merupakan wilayah yang paling dekat dengan perusahaan dan sesuai dengan wilayah operasi perusahaan, hal ini dikarenakan Tanjung Palas adalah wilayah ring 1, dan wilayah yang membutuhkan adanya program tersebut, serta tepatnya kelompok nelayan TUNA sebagai penerima program kampung minapolitan, karena kelompok nelayan TUNA ini satu-satunya kelompok Nelayan yang paling dekat dengan perusahaan.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Menurut Siswanto dalam Wedayanti (2018:6), Perencanaan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut (Prayogo, 2011) Monitoring merupakan penilaian berkelanjutan atas proyek atau program yang sedang berjalan, bisa setiap triwulan, semester, atau tahunan, untuk memastikan implementasi dan alokasi *resource* berjalan sebagaimana rencana dan jadwal.

Salah satu cara untuk mengetahui suatu program CSR berhasil atau tidak adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan keharusan untuk setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program (Dinasih, Pradekso, & Naryoso, 2013). Evaluasi program adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang di rencanakan (Arikunto & Jabar, 2004).

Melihat sejauh mana proses perencanaan pemerintah dan perusahaan sebagai fasilitator yang mengetahui dalam pelaksanaan Program CSR serta hal-hal apa saja yang bersangkutan tentang keberlanjutan pelaksanaan program CSR baik mengontrol maupun mengevaluasi program yang dijalankan sebagai proses peningkatan kualitas program CSR dan peningkatan pada pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah dalam pelaksanaan program pengembangan kampung minapolitan adanya koordinasi serta pelibatan instansi terkait dan masyarakat?”, beliau mengatakan :

“ Ada, koordinasinya itu dengan kita karena yang dibantu kelompok Nelayan jadi koordinasinya ke Dinas Perikanan, koordinasinya dalam bentuk data-data” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“ Kalau dalam menyampaikan program itu menyangkut dengan Dinas, Dinas pasti ikut, karena penerimanya Nelayan maka Dinas perikanan pasti dilibatkan dan tidak bisa asal memberi saja, minimal aparaturnya paling bawah dari Camat ke Lurah harus ada koordinasi itu” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos pada 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II Dumai, beliau mengatakan :

“ Ada, kita bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, terus kita bekerja sama dengan Politeknik Perikanan dan Kelautan, biasanya Mahasiswa mereka mengadakan pengabdian masyarakat, mereka masuk disitu sebagai tenaga ahli, daripada kita membayar instruktur atau orang lain untuk mengajarkan teknologi, jadi lebih baik kita bekerja sama dengan Politeknik, mereka bersedia melakukan pelatihan dan mengadakan teknologi panel surya dan teknologi fish finder jadi kita tidak harus membayar biaya untuk melakukan pengadaan itu” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Saya kurang tahu juga koordinasinya seperti apa, karena saya masih baru disini, mungkin Camat yang lama lebih tahu seperti apa bentuk Koordinasinya. Yang pasti kalau ada kegiatan-kegiatan atau Program CSR, pihak kecamatan pasti memberikan izin” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Saya rasa pasti ada koordinasi, pasti melibatkan Dinas terkait, yang ada andil dalam Program Kampung Minapolitan itu pasti terlibat” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau koordinasi itu ada, apa pun yang mereka buat pasti ada koordinasi , ke kelurahan, ke kecamatan, dengan Dinas Perikanan mereka bekerja sama” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau koordinasi sama pemerintah itu tidak ada, mereka langsung datang, Nelayannya harus ada SK dari Dinas Perikanan, hanya itu saja” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Ada, koordinasi itu dengan Dinas Perikanan, termasuk Pemerintah Daerah ikut semua, jadi mereka tahu seperti Lurah, Camat itu tahu. Kalau sekarang Lurah dan Camat baru, kemungkinan mereka tidak tahu” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dengan Dinas Perikanan, Lurah, Camat, RT. Waktu itu kami di survey dulu, benar atau tidak kami ini ada. Kalau masyarakat lain itu tak dilibatkan, hanya kelompok yang menerima aja” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Koordinasi itu yang kami tahu macam dengan Dinas Perikanan, Lurah dengan Camat yang dulu tahu, kalau yang sekarang mungkin belum tahu karena masih baru” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Melibatkan Dinas Perikanan yang kami tahu, pembinaan-pembinaan dari Dinas Perikanan, ada penyuluhnya yang datang setiap bulannya. Kalau masyarakat lain tak ada dilibatkan, hanya kami sebagai penerima program Saja” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Ada, dengan Dinas Perikanan kami diberi penyuluhan sama mereka, didampingi. Terus Pemerintah Kota tahu juga, Kalau masyarakat hanya kelompok TUNA ini yang terlibat, sebagai penerima program, ada 15 orang jumlahnya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Koordinasi dengan Dinas Perikanan, ya melibatkan Dinas Perikanan. Pemerintah Daerah seperti Lurah sama Camat yang dulu tahu bahwa disini ada program ini, pelibatangannya itu dalam bentuk izin yang diberikan, Tetapi untuk keberlangsungan program hanya kami sama perusahaan, dan Dinas Perikanan yang membimbing kami” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Program CSR yakni Program Pengembangan Kampung Minapolitan apakah adanya upaya Pemerintah dan Perusahaan untuk mengawasi keberlanjutan program tersebut?” , yang dijawab oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Kalau dari Dinas bentuk pengawasannya itu pembinaan, kelompok yang dibantu oleh CSR Pertamina itu tetap kita lakukan pembinaan, jadi kedepannya apakah ada keberlanjutan untuk program itu tergantung Pertamina, kalau kami tentu mengharapkan berlanjut karena sekarang baru 1 kelompok” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Kalau upaya dari perusahaan pasti ada, tetapi kalau dari pemerintah saya kurang tahu juga, karena Pertamina yang meletakkan CSR disitu” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor Communication Relation & CSR RU II, Beliau mengatakan:

“Kami selalu setiap bulan ada kunjungan kesana, terus kami juga kalau misalkan monitoring juga terkadang melibatkan Politeknik, kira-kira ada feedback apa sih yang sekiranya diperlukan untuk pengembangan ini” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Dari Pertamina sendiri Pasti ada upaya itu, jalan atau tidak usahanya, mungkin ada bagian yang meninjau ke Kampung Minapolitan itu, kalau dari pihak kecamatan memang belum ada pengawasan langsung untuk Program CSR tersebut” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau dari Perusahaan jelas mereka mengawasi programnya, pasti mereka melakukan pengecekan untuk perkembangan dari program tersebut. Pengawasan timbul apabila ada dana yang keluar, karena dana dari perusahaan jadi mereka yang mengawasinya, kalau dari kelurahan hanya survey-survey ke masyarakat saja, tidak ada pengawasan khusus untuk program kampung Minapolitan itu, kalau dari Dinas terkaitnya mungkin ada” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Ada, orang CSRnya mengawasi terus, mereka akan turun langsung ke lapangan, Kalau Kampung Minapolitan ini perkembangannya bagus, mereka akan melanjutkan, dan Pemerintah sendiri yang melakukan pengawasan itu hanya Dinas Perikanan” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dari Perusahaan itu pengawasnya ada, mereka monitoring. Kalau dari Pemerintah ya Dinas Perikanan, Lurah atau Camat tak ada lah mereka mengawasi perkembangan program ini seperti apa, kalau ada acara seperti

penyerahan bantuan dana, mereka diundang dan hadir, hanya sebatas itu” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Itu biasanya monitoring setiap bulannya, tetap memantau. Kalau dari Dinas itu setiap bulannya, kadang 2 minggu sekali, Ada pembimbingnya dari Dinas perikanan ” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Pengawasannya ada dari Pertamina dan Dinas seperti monitoring, misalnya ingin membuat sesuatu, mereka turun ke lapangan, kerja sama dengan kami” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Mereka turun lapangan dan mengecek sebulan sekali. Mereka menelfon terlebih dahulu untuk memastikan kami di darat atau di laut, kalau kami di darat baru orang CSR Pertamina datang, begitu juga dengan pembimbing kami dari Dinas Perikanan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Ada, pengawasannya dari Pertamina, mereka bertanya seperti apa perkembangannya, tak tentu juga datangnya, sedangkan dari pemerintah sendiri tak ada mereka melakukan pengawasan untuk keberlanjutan Program ini” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Upaya itu ada seperti monitoring ke lapangan, Biasanya yang melakukan pengawasan itu dari Pertamina sendiri dan Dinas Perikanan, itu setiap bulan biasanya ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Pengawasan untuk keberlanjutan program ini tentu nya ada, dari orang CSR Pertamina dan dari Dinas Perikanan, mereka kadang sebulan sekali mengecek kondisi dilapangan seperti apa. Kalau orang CSR itu kadang kalau program mereka lagi berjalan, sering mereka kesini, tetapi kalau tak ada program apa pun, paling sebulan sekali ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Program CSR yakni Program Pengembangan Kampung Minapolitan apakah adanya evaluasi dari Pemerintah dan Perusahaan terhadap program tersebut?”, yang dijawab oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Kalau evaluasi dari Program Kampung Minapolitan, Dari Dinas kita hanya sebatas pembinaan, Dana dari pertamina jadi evaluasinya dari Pertamina. Mereka juga turun ke lapangan, kalau Dinas tidak melakukan evaluasi untuk Program CSR tersebut, kita hanya melakukan pendampingan ke Kelompok Nelayan ” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“Evaluasinya mungkin secara internal Perusahaan, Pemerintah pasti melakukan evaluasi, seperti Pertamina ini meletakkan di Perikanan, Pemerintah pasti mengevaluasi itu, apa yang kurang untuk program lanjutannya, biasanya Pemerintah mengasih saran atau pandangan bahwa perikanan itu butuh nya A , maka Pertamina memberikan yang dibutuhkan. Memang yang menerima langsung masyarakat, tetapi koordinasi pasti ada. Cuma hari ini belum terlaksana full apa yang dimaksud dengan PERDA TJSP Kota Dumai. Tahun 2022 ini kami komit untuk merevisi sehingga perusahaan nanti juga tidak bingung, dan nanti bagaimana forum TJSP mengatur anggaran CSR dari Pertamina setiap tahunnya sekian, dan cocoknya untuk pembangunan apa dan program apa yang bisa dijalankan, itu nanti kita akan merevisi PERDA TJSP Kota Dumai agar lebih jelas” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II, Beliau mengatakan:

“Ada, kalau evaluasi hanya internal perusahaan, kami sendiri yang melakukan evaluasi secara berkala, ada juga dari eksternal biasanya dari lembaga pendidikan STIA Lancang Kuning untuk melakukan evaluasi, untuk tahun 2020 kemarin itu ada Indeks Kepuasan Masyarakat” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau evaluasi pasti ada dari Pertamina agar lebih baik lagi kedepannya, Cuma itu antara Pertamina dan kelompok yang dibantu, jadi evaluasinya antara mereka saja. Karena ini Program CSR nya Pertamina, anggaran pun dari mereka, jadi pasti mereka ada evaluasi supaya tidak sia-sia program yang mereka berikan, dari Pemerintah sendiri tidak ada melakukan evaluasi, kecuali Program Kampung Minapolitan ini programnya Pemerintah baru pihak kecamatan melakukan evaluasi karena dananya dari Pemerintah” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dari perusahaan pasti mengevaluasi, kalau mereka membuat Program CSR terkait dengan ketercapaiannya pasti diukur dan ada evaluasi, setelah diberikan bantuan apakah Nelayan ini maju atau mundur. Ada kemajuan tidak setelah diberi bantuan ini dan ditinjau kelemahannya. Kalau evaluasi dari Kelurahan itu tidak ada ” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Ada, Perusahaan selalu mengevaluasi program-program yang mereka jalankan, agar anggaran yang mereka keluarkan itu tidak Cuma-Cuma ” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“Evaluasinya mungkin dari Pertamina sendiri, mereka bertanya keinginan masyarakat dan yang baik untuk dilaksanakan kedepannya sebagai perbaikan ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“Kalau evaluasinya itu ada, orang lapangan perusahaan menanyakan ke kami, apa yang selanjutnya bisa kami kembangkan. Kegagalan ikan waktu itu disebabkan oleh pakan, karena sekarang pakan ikan itu harganya tinggi, kalau untuk budidaya itu sudah tidak menguntungkan ” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Ada evaluasi dari Pertamina, mereka menanyakan ke kami juga apa yang kami butuhkan, kalau kami butuhnya yang nelayan ini difokuskan, Cuma mereka tak mau, jadi percuma juga kami mengeluarkan pendapat, tapi mereka tak bisa memenuhi” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Evaluasi itu ada lah, tapi tetap tak sesuai dengan harapan kami, Pertamina ini asal program mereka jalan aja, jadi kami minta untuk dibantu sepenuhnya di nelayan, tak usah lagi ke budidaya tetap juga mereka mau ada budidaya, jadi kami menerima aja, daripada tak dapat sama sekali” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Ada dari Perusahaan, kami menerima apa yang dikasih sama mereka, orang CSR Pertamina memberi tahu kami apa yang akan dilakukan, terus kami yang menjalankannya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Evaluasi ada, dari Perusahaan itu lah evaluasinya, kami menerima saja yang mereka minta untuk membuat ini atau apa pun yang mereka minta, kami menjalankannya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Evaluasi pasti ada dari orang CSR, bagaimana bagus nya nanti mereka sampaikan ke kami apa yang mau dilakukan lagi kedepannya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi hanya dilakukan oleh perusahaan dan Dinas terkait, hal ini dikarenakan badan yang mengawasi pelaksanaan CSR di Kota Dumai yakni Forum TJSP belum berjalan dengan baik, sehingga Camat dan Lurah tidak mengetahui bagaimana perkembangan dari program kampung minapolitan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Proses monitoring terhadap program kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas dilakukan oleh pengawas dari PT Pertamina RU II Dumai dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, monitoring yang dilakukan oleh Dinas terkait berbentuk pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok Nelayan TUNA, sedangkan untuk evaluasi program dilakukan oleh internal perusahaan secara berkala serta pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi STIA Lancang Kuning melakukan penelitian terkait Indeks Kepuasan Masyarakat, hal ini disampaikan oleh *Comunnity Development Officer* RU II Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai untuk program Kampung minapolitan mulai dari koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai sangat intens berkoordinasi dengan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dimana menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok TUNA itu sendiri, selain itu Perusahaan juga menggandeng mahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagai tenaga ahli untuk mengurangi anggaran dan kemudahan Perusahaan, sedangkan untuk monitoring sendiri, Perusahaan juga sering melakukan kunjungan sebagai bentuk pemerhatian terhadap keberlangsungan program sebulan sekali, bahkan sering apabila ada kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan perlu, untuk evaluasi sendiri, perusahaan tidak terlalu banyak melibatkan stakeholder perusahaan hanya melakukan evaluasi secara internal saja, dalam evaluasi ini juga memberikan perubahan untuk kegiatan berikutnya yang semisalnya untuk kebutuhan pakan, akan tetapi perusahaan sering kali tidak mendengarkan evaluasi dari Kelompok TUNA yang dimana Kelompok TUNA hanya cukup sebatas menerima dan menjalankan saja dan untuk pemerintah sendiri dimana Dinas Perikanan yang menaungi Kelompok TUNA ini sering memberikan pembinaan-pembinaan saja, dari hal diatas Peneliti menyimpulkan pelaksanaan program CSR pada indikator perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi terlaksana dikarenakan dalam pelaksanaan program kampung minapolitan ini PT Pertamina RU II Dumai berkoordinasi dengan instansi terkait dan kelompok penerima, dan juga adanya upaya dari perusahaan untuk mengawasi keberlanjutan dari program kampung minapolitan ini dalam bentuk monitoring setiap sebulan sekali, dan Dinas Perikanan RU II Dumai rutin melakukan

pembinaan terhadap kelompok nelayan TUNA, serta adanya evaluasi terhadap program tersebut dari perusahaan.

6. Pelibatan Stakeholder

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Wibisono, 2007:90) *Stakeholders* adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Menurut Waddock dan Graves (dalam Mardikanto, 2015:172), *Stakeholders* terdiri dari dua yakni *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer terdiri dari pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan *Stakeholders* sekunder terdiri dari organisasi nonpemerintah (LSM), aktivis dan akademisi, masyarakat, dan pemerintah.

Fungsi Pemerintah sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat menjadi dasar penting melihat program CSR yang dijalankan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan sendiri, Pemerintah harus terlibat dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan memiliki keberlanjutan dan berproses demi keberlangsungan program.

Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah dalam pelaksanaan

program CSR yakni Program pengembangan kampung minapolitan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan dan aksi?’, Beliau mengatakan :

“ Kalau pelaksanaan tetap melibatkan kami, sedangkan anggaran dari mereka. Dan kita tetap melakukan pembinaan untuk kelompok, mendampingi kelompok TUNA ini, apa yang Kelompok dapatkan itu kami dampingi” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“ Kalau dari kami tidak ada dilibatkan dalam program tersebut, mereka pun tidak ada laporannya ke DPRD, sehingga kami tidak tahu sejauh mana Pertamina ini sudah berkontribusi di Masyarakat” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos pada 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II Dumai, beliau mengatakan :

“iya melibatkan kelompok Nelayan TUNA ini sebagai penerima program, dan Dinas Perikanan Kota Dumai” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Paling yang dilibatkan itu Dinas terkait saja, karena ini mengenai perikanan, berarti yang dilibatkan Dinas Perikanan. kalau Pemerintah Daerah belum ada sampai saat ini. Yang terlibat dalam pelaksanaannya itu Pertamina sama kelompok yang dibantu, tapi kalau soal izin-izin itu ke kita , dari lurah kemudian diteruskan ke camat” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Setahu saya Yang dilibatkan Dinas Perikanan saja, mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat, kalau dari Kelurahan sendiri tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaan dan aksinya ” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Dari Perusahaan melibatkan Dinas, kalau mereka membantu Nelayan, yang dilibatkan untuk pelaksanaannya ya Dinas Perikanan. Pemerintah mau kegiatan apa pun tetap mensupport Pertamina ” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Yang saya tahu Kalau dalam pelaksanaannya Pertamina sama kelompok Nelayan saja yang terlibat, sama Dinas Perikanan. Kalau dari pemerintah hanya Dinas Perikanan, yang lainnya tak ada terlibat, pemerintah ini tahu bagus saja ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Jadi Perusahaan ini hanya melibatkan kelompok yang dibantu, dan kami termasuk kelompok binaan Pertamina, untuk program ini melibatkan Dinas Perikanan ” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Ada Dinas Perikanan yang mendampingi kami, jadi apa yang kami dapat dari Pertamina itu kami jalankan dengan didampingi oleh Pendamping kami dari Dinas, orang CSR Pertamina juga mendampingi kami ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Pelaksanaannya melibatkan Dinas Perikanan, kami ada dikasih penyuluhan-penyuluhan dari Dinas Perikanan. Tetapi anggaran dari Perusahaan, kegiatan-kegiatan apa yang mau dilakukan itu tergantung Pertamina, Karena mereka yang punya anggaran ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Melibatkan, melibatkan Dinas, Lurah, Camat, tetapi Camat sama Lurah yang baru ini belum ada mereka kesini, tapi kalau yang dulu mereka tahu, pernah juga kesini ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Yang terlibat itu seperti Dinas Perikanan karena kami Nelayan, jadi pelibatan langsung ke Dinas Perikanan, terus Lurah, Camat itu pelibatangannya dalam bentuk izin-izin saja ” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Yang selalu terlibat itu Dinas Perikanan, selalu memberikan pembinaan kepada kami, dan Pertamina juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana program mereka” (Wawancara 4 Februari 2022).

Selanjutnya Peneliti bertanya dengan Pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program CSR yakni Program Pengembangan Kampung Minapolitan apakah Perusahaan melibatkan instansi terkait dan masyarakat dalam evaluasi?” , yang dijawab oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan:

“ Kalau evaluasi orang dari Pertamina langsung melihat kelapangan, kalau Dinas tidak ada mengevaluasi program itu, Pertamina langsung turun sendiri, Mereka tidak melibatkan Dinas lagi, paling nanti secara personilnya kepada pendamping kita untuk pembinaan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022 pukul 10.52 WIB, menyebutkan :

“ Mungkin melibatkan Dinas terkait, seharusnya Pertamina itu mendiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah, apa saja program pemerintah yang tidak terrealisasi di daerah itu, karena pemerintah yang lebih tahu terhadap kebutuhan masyarakat, harusnya seperti itu, kalau Pertamina dan perusahaan lainnya tidak seperti itu, maka nya tahun 2022 ini kami akan melaksanakan PERDA TJSP sebagaimana mestinya” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *Community Development Officer* RU II Dumai yakni Bapak Mukhammad Fatkhullah, S.Sos.,M.Kesos pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.37 WIB di Kantor *Communication Relation & CSR* RU II, Beliau mengatakan:

“ Iya kalau Dinas Perikanan itu kami ajak langsung kelapangan, untuk mengetahui bagaimana progressnya, ada kendala atau tidak selama dilakukan program itu” (Wawancara 4 Maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau evaluasi secara resmi itu tidak melibatkan kami, tetapi kalau misalkan secara informal kita bertemu di acara, dan kita di undang sama mereka kita hadir. Tapi kalau untuk keterlibatan secara formal itu tidak. Mungkin itu antara pihak pemberi dan penerima CSR saja. Kami mendukung dan memperhatikan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Jadi setahu saya, evaluasi itu dari mereka sendiri, kalau instansi seperti Dinas Perikanan mungkin dilibatkan dan bekerja sama. Kalau dari kelurahan tidak ada dilibatkan untuk evaluasinya” (Wawancara 2 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022 pukul 11.06 WIB, Beliau mengatakan:

“ Evaluasi dari Pertamina tentu ada, kalau Dinas Perikanan mungkin ada dilibatkan, tapi kurang tahu juga, karena Pertamina ini langsung ke masyarakatnya” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau evaluasinya itu dari Pertamina sama kelompok TUNA itu, mereka mungkin musyawarah apa yang mau dilakukan untuk perbaikan, harus ada

kesepakatan antara Pertamina sama Nelayan TUNA itu, evaluasi tuh antar pertamina sama penerima programnya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau untuk evaluasi itu melibatkan kami, untuk program kampung Minapolitan ini apa pun kegiatan yang dilakukan harus diketahui oleh Dinas Perikanan” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kami dilibatkan juga untuk evaluasi, Kami kasih masukan juga sama orang CSR itu, tapi mereka itu yang penting program orang tuh jalan. Tak menerima masukan, jadi apa kata Perusahaan kami nurut, alhasil jadinya seperti ini tidak maksimal programnya, bisa kami maju asalkanenuhi dulu satu usaha nelayan ini” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Terlibat juga kami untuk evaluasi program ini, kami ada juga kasih usul sama orang lapangan Pertamina, tak perlu lagi ada budidaya, tapi mereka tetap juga mau budidaya. Kami minta untuk Nelayan ini dibantu sepenuhnya sama mereka, Karena dari nelayan ini lumayan hasilnya, daripada budidaya. Budidaya ini tak ada hasil. Dana yang cair mesti dibagi-bagi, jadinya hasil pun tak sesuai harapan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Pertamina itu memang ada menanya sama kami, kalau seperti ini bagaimana bagusnya, Cuma masukan dari kami ini tak didengarkan sama mereka. Kami ceritakan juga kalau di budidaya nih tak usah lagi, bagus dananya penuh

untuk nelayan, tapi tetap dibagi-bagi dananya, jadi satu tak maksimal, satu lagi pun tak maksimal” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Evaluasi dari perusahaan, apa kata mereka, ya itu yang kami lakukan. Kami ada juga mengusulkan tapi mereka tak menerima, bagi mereka yang penting program mereka jalan, dana dari mereka, program-program itu semua dari mereka, kami yang menjalankan perusahaan mendampingi” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Kami menyampaikan juga pendapat kami ke orang CSR dari Pertamina, Cuma mereka tak bisa memenuhi usulan kami itu, memang mereka bertanya sama kami, apa yang bagus untuk dilaksanakan kedepannya, tapi pas mau pelaksanaan tetap mereka ada keputusan sendiri”. (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Dalam pelaksanaan program kampung minapolitan, Perusahaan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dan Kelompok Nelayan TUNA dalam pelaksanaan dan aksi, namun Lurah dan Camat tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program kampung minapolitan di kelurahan Tanjung Palas, perusahaan juga melibatkan kelompok penerima yakni kelompok nelayan TUNA, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, dan Akademisi, dalam proses evaluasi yang diharapkan oleh kelompok penerima program kampung minapolitan yaitu perusahaan bersedia menerima masukan yang disampaikan oleh kelompok Nelayan TUNA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber, pelaksanaan program kampung minapolitan stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Akademisi dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Dumai sebagai tenaga ahli yang memberikan pelatihan kepada kelompok Nelayan dalam menggunakan alat pendeteksi ikan atau *fish finder*. Stakeholders yang dilibatkan dalam pelaksanaan program kampung minapolitan ini dilibatkan juga dalam evaluasi, namun masukan-masukan yang disampaikan tidak sepenuhnya diterima oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber tentang keterlibatan stakeholder, dalam Pelaksanaan program CSR Perusahaan melibatkan unsur-unsur stakeholder misalkan Akademisi dan Dinas terkait akan tetapi DPRD kota Dumai yang juga merupakan dari pihak Pemerintah Daerah merasa tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam segala bentuk aktivitas bahkan laporan yang sebenarnya bisa mempermudah mensinkronkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan program yang dilaksanakan, Program lebih banyak melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yang dimana kelompok TUNA sendiri juga dinaunginya, sama halnya pelibatan didalam evaluasi, Pemerintah dan kelompok TUNA ini sendiri hanya diberikan wadah untuk memberikan saran terkait dengan progress kedepannya akan tetapi Kelompok TUNA hanya akan melaksanakan sesuai dengan keputusan akhir internal Perusahaan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelibatan stakeholder Kurang

Terlaksana karena dalam pelaksanaan dan aksi untuk program kampung minapolitan perusahaan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai sebagai *partner* kerja sama, perusahaan juga melibatkan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Dumai sebagai tenaga ahli untuk melakukan pelatihan terhadap kelompok Nelayan TUNA dalam menggunakan teknologi canggih yang diberikan perusahaan seperti *fish finder*, dalam evaluasi Perusahaan memang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dan kelompok nelayan TUNA, namun perusahaan tidak menerima masukan dan saran dari kelompok sasaran dan Dinas Terkait untuk perbaikan kedepannya, karena keputusan akhir berada pada internal perusahaan, sehingga masukan dan saran serta keinginan dari kelompok sasaran ini tidak terpenuhi.

7. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan keharusan dari sebuah program, pemerintah sebagai fasilitator diharapkan melakukan pembinaan, dan melaksanakan kontrol terhadap program serta mengevaluasi program.

Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan perihal keberlanjutan dengan pertanyaan sebagai berikut “Menurut Bapak/Ibu Program CSR yang dijalankan Perusahaan yakni Program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas apakah sesuai dengan kebutuhan dan adanya progress yang lebih baik dari program tersebut?” , yang dijawab langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Kalau sesuai, pasti ada banyak permintaan dari Nelayan. Kita tidak bisa menuntut banyak dari Pertamina, mungkin mereka menanyakan apa saja yang kurang, tapi sebatas anggaran yang perusahaan punya. Kalau progres yang lebih baik saya rasa ada, yang tadi nya hanya hasil melaut terus sekarang mendapat hasil dari budidaya ” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi III Kota Dumai yakni Bapak H. Johannes MPT, S.H.,MM , di Gedung DPRD Kota Dumai lantai 2 pada 9 Februari 2022, menyebutkan :

“Makanya kami tidak pernah tahu kampung minapolitan ini peruntukannya apa, prinsipnya kalau pemerintah sudah terlibat disitu kami percaya bahwa itu sesuai kebutuhan. Untuk Progresnya Kalau dilihat-lihat dari dulu masih sama saja, artinya tidak ada sesuatu yang menonjol” (Wawancara 9 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos selaku *Community Development Officer* RU II Dumai, beliau mengatakan:

“ Dari kami sih sesuai sama kebutuhan mereka. Kalau dari tahun ke tahun pasti ada progresnya, karena kita lihat dari kolamnya saja, tahun 2018 itu kolam terpal, sedangkan ditahun 2019 itu bertambah menjadi kolam semen, Jadi progressnya benar-benar ada” (Wawancara 4 maret 2022)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Pasti sudah sesuai, Pertamina membantu berdasarkan kebutuhan, yang pasti mereka sudah tahu kebutuhan kelompok ini apa, maka diberikan oleh mereka bantuan tersebut, yang namanya bantuan tidak bisa sepenuhnya terpenuhi kebutuhan itu. Kalau progress yang lebih baik itu seharusnya ada” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau itu saya rasa sudah sesuai, tapi pasti belum sepenuhnya terpenuhi. Dari program itu mereka membantu kelompok masyarakat yang ada disekitar mereka. Kalau progress itu sejauhnyanya saya belum tahu seperti apa, karena memang belum ada saya survey kesana” (Wawancara 2 Februari 2022)

Sedangkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Belum sesuai, harusnya Kampung Minapolitan itu banyak lini, tidak bisa hanya Nelayan saja, semua sendi harus masuk, karena masyarakat yang lain pasti akan cemburu. Kalau Kampung Minapolitan ini masih sama saja, belum ada progress yang lebih baik” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau itu tergantung masyarakatnya, kalau soal kebutuhan itu memang sesuai tetapi tak sepenuhnya. Kalau progress itu saya rasa masih sama saja, belum terlihat lah perubahannya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Kalau sesuai itu belum sesuai, masih banyak kekurangannya, karena yang namanya bantuan tidak pernah mencukupi kebutuhan kelompok. Progres yang lebih baik itu, masih sama saja” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Belum sesuai lagi, sebabnya maunya kita itu kan belum dapat, Keinginan mereka itu lah yang kami ikuti. Sedangkan progres masih Sama saja, dari

tahun pertama dan kedua itu sama aja, belum ada perubahan yang lebih baik”
(Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Belum sesuai, karena apa yang kami butuhkan tak dapat sepenuhnya, jadi kami ikut mereka saja, jadi Perusahaan tuh membantu pun rasanya sia-sia, bagus memang kalau mau ada usaha tambahan, tapi usaha yang satu ini dipenuhi dulu. Kalau progres Kami rasa lah masih sama saja”
(Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Kebutuhan kami itu memang ada yang kami dapat, tapi tak sesuai sama apa yang kami harapkan, misalnya kami butuh 10 itu yang dapat Cuma 2, jadi masih jauh lah. Progresnya Sama saja, tahun pertama sama kedua itu sama saja, tahun ketiga ini lah kami belum tahu macam mana nya” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Belum sesuai, karena yang kami butuhkan itu untuk Nelayan ini sepenuhnya, tapi Pertamina itu tetap membagi-bagi dana untuk budidaya, alhasil budidaya tak berkembang, di Nelayan pun tak maksimal dibantunya. Menurut saya kalau progres masih berjalan ditempat ya, tak maju, malah tahun kedua dibantu itu untuk budidaya ini tidak ada keuntungan, bahkan modal kami pun tak kembali” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Sesuai itu belum, mereka ingin kami ini ada usaha tambahan selain nelayan, jadi ditambah usaha budidaya, tetapi usaha budidaya ini bukan kebutuhan kami yang sebenarnya. Menurut saya dari tahun ke tahun belum ada menunjukkan progres yang lebih baik” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil observasi yang peneliti lakukan, pelaksanaan program kampung minapolitan yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai belum menunjukkan progres yang lebih baik, hal tersebut terlihat dari tidak berkembangnya usaha budidaya yang diberikan oleh PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok Nelayan TUNA sehingga usaha budidaya tersebut tidak berlanjut, kelompok Nelayan TUNA yang merupakan nelayan yang keahliannya melaut merasa tidak cocok dengan usaha budidaya yang diberikan oleh perusahaan karena melaut dan budidaya merupakan suatu keahlian yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber, dari pihak perusahaan menyatakan bahwa program kampung minapolitan sesuai dengan kebutuhan kelompok Nelayan TUNA serta adanya progres yang lebih baik selama pelaksanaan program kampung minapolitan, namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh narasumber lainnya yang menyebutkan bahwa kebutuhan kelompok nelayan TUNA belum sepenuhnya terpenuhi, karena masukan yang disampaikan oleh kelompok penerima program tidak terpenuhi sehingga kelompok nelayan TUNA merasa bahwa usaha budidaya bukan kebutuhan dari kelompok TUNA, program kampung minapolitan tersebut juga belum menunjukkan progres yang lebih baik dikarenakan belum tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan pendapatan kelompok nelayan TUNA di Kelurahan Tanjung

Palas, dan kegagalan yang dialami kelompok Nelayan TUNA dalam usaha budidaya juga membuat kelompok nelayan tidak melanjutkan usaha budidaya yang diberikan, sehingga tidak ada keberlanjutan dari program yang diberikan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber , pada indikator keberlanjutan dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina RU II Dumai terus memberikan perubahan setiap tahunnya, akan tetapi tetap menjadi kendala adalah masih banyak pemberian yang diberikan Perusahaan bukan berdasarkan dari permintaan dari Kelompok TUNA , hal ini yang menjadikan kelompok TUNA dituntut untuk bisa mengikuti kebijakan yang diberikan oleh perusahaan yang alhasil Kelompok TUNA merasa belum banyak merasakan progress yang fokus pada satu pemberian saja akan tetapi pembagian dana-dana program CSR sedikit untuk pelaksanaan program hal tersebut menjadi penyebab tujuan dari program tidak tercapai, hal ini juga didukung dengan beberapa program bantuan dari PT Pertamina RU II dumai yang tidak tepat sasaran setiap tahunnya yang dirasa tidak ada progress lebih baik kedepannya misalkan seperti kolam ikan yang awalnya terbuat dari terpal meskipun sekarang sudah menjadi kolam yang terbuat dari semen tetapi tidak ada progress lebih baik karena kolam ikannya sekarang terbengkalai dan sudah tidak digunakan oleh Nelayan, menurut pengakuan dari Kelompok TUNA kolam ikan tersebut tidak ada perkembangannya karena kerap kali mengalami kerugian yang apabila diteruskan akan membuat kerugian lebih banyak lagi, sehingga kolam ikan tersebut sekarang sudah tidak difungsikan lagi, sehingga dapat disimpulkan pada indikator keberlanjutan tidak terlaksana karena

kebutuhan dari kelompok nelayan TUNA tidak terpenuhi secara maksimal, dan progres dari program kampung minapolitan ini masih sama saja, tidak menunjukkan progres yang lebih baik dikarenakan usaha budidaya ikan yang dilakukan tidak berlanjut hingga saat ini.

8. Hasil Nyata

Adanya *outcome* yang didapat atau yang ditimbulkan setelah terlaksananya program dan memberikan kegunaan bagi masyarakat maupun perusahaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan program pengembangan kampung minapolitan memberikan dampak nyata terhadap kelompok nelayan TUNA?”, Beliau mengatakan :

“ Dampaknya itu ada, Nelayan TUNA ini jadi punya usaha baru, pengetahuan baru dibidang budidaya yang biasanya mereka hanya tahunya melaut, sekarang mereka punya ilmu baru, usaha budidaya ikan di kolam, itu dampaknya untuk Nelayan, yang bisa dikembangkan untuk kedepannya” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos selaku *Community Development Officer* RU II Dumai, beliau mengatakan:

“Kalau dampak nyata itu dari segi pendapatan ya, Cuma ada peningkatan pendapatan per tahun” (Wawancara 4 Maret 2021)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“ Dampak nyatanya ya kelompok nelayan TUNA ini jadi memiliki usaha tambahan, seperti budidaya ikan selain melaut mereka pasti ada tambahan pemasukan dari kolam itu” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dampak nyatanya pasti ada untuk kelompok nelayan itu, karena diberi bantuan untuk mereka, pasti ada dampak nyatanya untuk mereka” (Wawancara 2 Februari 2022)

Sedangkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa'i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Dampaknya itu kelompok Nelayan itu ada usaha sampingan, selain melaut ada juga kolam ikan mereka bantuan dari Pertamina, apakah usaha itu berkembang atau tidak, kami juga kurang tahu, karena memang kami tidak dilibatkan langsung” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dampaknya tuh tak ada apa-apa, masyarakat pun ingin juga mereka dapat, makanya ini lah sebagai contoh” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“ Dampak nyatanya yaitu kami terbantu untuk merehab kapal, dana CSR ini bisa lah untuk memperbaiki kapal dan bantuan alat tangkap untuk di laut, di darat ini yang belum berhasil untuk penghasilan tambahan. Ini lah mau kita kembangkan lagi seperti apa yang bagusnya supaya ada tambahan hasil kedepannya” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Dampak nyata itu berkurang kesusahan masyarakat Nelayan ini, untuk merehab kapal, penambahan alat tangkap, Kalau dengan dana pribadi memang dapat, tapi harus menunggu lama, Walaupun yang didapat tak sesuai harapan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Dampak nyatanya itu kami memang terbantu, dapat membeli jaring, rawai, perbaiki kapal. Kolam ikan ada, tetapi sekarang tak ada isinya karena tak berkembang tadi, daripada diteruskan dana habis beli pakan, jadi tak dilanjutkan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Dampak nyatanya ada, saya sendiri itu terbantu dengan dana itu kan, waktu itu rawai saya rusak karena sudah lama juga, pas kebetulan dana cair, jadi bisa beli yang baru, kalau tak ada dana itu mungkin saya tak bisa melaut dulu, harus menunggu dana pribadi terkumpul” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Dampak nyatanya ada lah kolam ikan di pekarangan rumah kami, tetapi sekarang ikannya tak ada, karena kalau dilanjutkan percuma saja, tak berkembang” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“ Dampak nyatanya ada, itu ada usaha sampingan, tetapi usaha sampingannya tidak berkembang” (Wawancara 4 Februari 2022)

Selanjutnya peneliti bertanya dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah Pelaksanaan Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas memberikan manfaat nyata terhadap kelompok Nelayan TUNA?”, yang dijawab langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai yaitu Ibu Isroyanti, S.Pi.,M.Si pada 3 Februari 2022 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Beliau mengatakan :

“ Manfaatnya ini membuat Nelayan TUNA memiliki penambah penghasilan keluarga dari usaha budidaya, itulah manfaat bagi kelompoknya, pada saat angin kencang tidak bisa melaut, mereka punya usaha ekonomi sendiri, Manfaatnya ini sangat positif kalau mereka teruskan” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhammad Fatkhullah,S.Sos.,M.Kesos selaku *Community Development Officer* RU II Dumai, beliau mengatakan:

“ Manfaatnya Dari segi melaut ya, dulu salah satu masalah yang mereka hadapi yaitu mencari ikan kesulitan karena harus melaut keluar Dumai, jadi

kami bantu dengan fish finder yang bisa sangat membantu untuk menemukan titik ikan, jadi mereka tidak perlu berhari-hari dilaut, sekarang 1-2 hari mereka bisa langsung pulang. Mayoritas dari mereka kan LANSIA, otomatis dilaut itu resikonya lebih tinggi daripada mereka melakukan pekerjaan biasa didarat” (Wawancara 4 Maret 2021)

Sedangkan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Dumai Timur yakni Bapak Zainur, S.H di Kantor Camat Dumai Timur pada 3 Februari 2022 pukul 12.33 WIB, Beliau mengatakan:

“Manfaatnya itu tadi menambah pendapatan Nelayan dari usaha-usaha yang dibantu oleh Pertamina” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yakni Bapak Hafis Asbandi, S.Sos.,M.IP di Kantor Lurah Tanjung Palas pada 2 Februari 2022 Pukul 09.36 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Kalau betul-betul dikelola dengan baik pasti bermanfaat sekali dengan bantuan yang diberikan seperti kolam ikan, Bermanfaat lah bagi keberlangsungan kelompok tersebut” (Wawancara 2 Februari 2022)

Sedangkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Kota Dumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LPMK Tanjung Palas yakni Bapak Rifa’i Hasbi di Gedung LAMR Kota Dumai pada 8 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“ Manfaatnya itu tentu masyarakat terbantu atas anggaran yang mereka keluarkan, dapat membeli alat-alat tangkap mereka untuk melaut” (Wawancara 8 Februari 2022)

Sedangkan berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua RT 02 Tanjung Palas yakni Bapak Ramli di Rumah beliau pada 4 Februari 2022 pukul 16.51 WIB, Beliau menyebutkan:

“ Manfaatnya itu ada orang dari Pekanbaru pernah datang kesini, orang Pertamina datang juga melihat, jadi seperti bertukar ilmu, nambah pengetahuan Nelayan lah” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan TUNA yaitu Bapak Dahlan Zainudin di Rumah beliau pada 30 Januari 2022 pukul 11.57 WIB, Beliau mengatakan:

“Program ini memang bermanfaat, kalau bisa kami ini memang mengharapkan sekali bantuan itu setiap tahun, karena dengan ekonomi Nelayan sekarang ini, kalau tanpa dibantu oleh Perusahaan dan pemerintah itu memang susah sekali” (Wawancara 30 Januari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Ariyanto di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022 pukul 16.03 WIB, Beliau menyebutkan:

“Manfaatnya itu lah meringankan beban, tetapi kalau hasil tangkapannya itu tidak berpengaruh jadi itu tidak bisa dijadikan tolak ukur juga karena melaut ini tergantung rezeki” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Syahrudin di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Bermanfaat, membantu untuk beli alat tangkap ikan seperti jaring, rawai. Kalau biasanya pakai dana pribadi, ini dapat beli pakai dana bantuan” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Anasri di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Manfaatnya itu Mengurangi beban untuk membeli alat tangkap, perbaiki pompong, yang harusnya pakai dana pribadi, ini karena adanya bantuan itu, jadi pakai dana bantuan, dana pribadi bisa untuk kebutuhan yang lain” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Alwijaya di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau mengatakan:

“Terbantu juga kami untuk beli alat tangkap, rehab kapal, dana itu bermanfaat untuk kami, tapi kalau niat Perusahaan mau kami ada penghasilan tambahan dengan usaha budidaya memang usaha itu belum memberikan manfaat kesana” (Wawancara 4 Februari 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Nelayan TUNA yakni Bapak Rozali di Rumah Ketua Kelompok Nelayan TUNA pada 4 Februari 2022, Beliau menyebutkan:

“Bermanfaat jugalah program ini, dana dari mereka itu dapat menambah dana pribadi saya untuk beli jaring, rawai, yang tadinya kami mau beli 5 rawai dengan keluarnya dana dari mereka bisa saya beli 10 rawai” (Wawancara 4 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pada indikator hasil nyata belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan kelompok nelayan TUNA dikarenakan masih belum mempengaruhi dampak ekonomi dari program yang diberikan. Pemerintah dan perusahaan kurang berkoordinasi sehingga bantuan yang diberikan kurang berefek guna.

Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai yakni kampung minapolitan memberikan manfaat kepada kelompok Nelayan TUNA, kelompok Nelayan merasa terbantu dengan adanya dana CSR yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan program, namun program kampung minapolitan ini belum mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi kelompok Nelayan TUNA karena usaha budidaya yang dilakukan mengalami kegagalan, serta alat *fish finder* yang diberikan oleh perusahaan kurang efektif saat digunakan untuk mendeteksi ikan dilautan, karena yang terdeteksi dengan alat tersebut adalah ikan kecil-

kecil yang mana tidak bisa ditangkap dengan jaring ataupun rawai sehingga alat tersebut kurang berguna bagi kelompok Nelayan TUNA.

Berdasarkan hasil Wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber, pada indikator Hasil nyata bisa dikatakan berhasil apabila tujuan dari Program yang dilaksanakan tercapai maka akan didapati hasil nyata yang dibutuhkan kelompok TUNA, untuk tujuan pelaksanaan Program Kampung Minapolitan oleh PT Pertamina RU II Dumai yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, namun ketika peneliti bertanya kepada kelompok TUNA, pendapatan selama adanya program CSR dilaksanakan masih tidak adanya peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan kinerja dari kelompok TUNA ini sendiri juga belum efisien dikarenakan alat yang diberikan oleh PT Pertamina RU II Dumai juga tidak mendukung dalam peningkatan kinerja Nelayan dalam melaut akan tetapi dengan adanya Dana dari Program CSR ini sendiri, Kelompok TUNA merasa terbantu dikarenakan dimana mereka yang biasanya membeli perlengkapan untuk menangkap ikan atau bahkan untuk memperbaiki kapal yang sebelumnya menggunakan dana pribadi dengan adanya program ini dapat meringankan beban nelayan untuk membeli alat tangkap dan perbaikan kapal dengan menggunakan dana CSR, namun usaha budidaya yang dilakukan dalam Program CSR itu sendiri tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh kelompok Nelayan TUNA, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan Nelayan yang diharapkan bertambah dari usaha budidaya namun gagal dan juga dikarenakan dana untuk pelaksanaan program ini yang tidak begitu besar untuk mendukung kinerja

Nelayan pada saat dana program CSR di keluarkan, Nelayan hanya mendapat sebagian kecil untuk mendukung aktivitas usaha nelayan mereka dan peneliti menyimpulkan untuk hasil nyata cukup terlaksana meskipun tidak tercapai tujuan dari program, namun kelompok sasaran ini terbantu untuk pembelian alat-alat tangkap dan perbaikan kapal, Sehingga dapat disimpulkan pada indikator ini kurang terlaksana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

5.3 Matriks Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Berdasarkan matriks kesimpulan penelitian pada Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Matriks Kesimpulan Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

No	Indikator	Penilaian		
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Leadership (Kepemimpinan)	√		
	• Adanya dukungan dari perusahaan	√		
	• Adanya kesadaran filantropi dari pimpinan perusahaan	√		
2	Proporsi Bantuan		√	
	• Kesesuaian tingkat serapan perusahaan dengan program		√	
	• Kesesuaian anggaran perusahaan dengan program		√	
3	Transparansi dan Akuntabilitas		√	
	• Terdapat laporan tahunan			√
	• Adanya pertanggungjawaban atas keberlanjutan program	√		

		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana
4	Cakupan Wilayah	√		
	• Ketepatan wilayah penerima program	√		
	• Ketepatan penerima program	√		
5	Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	√		
	• Adanya jaminan pelibatan multi <i>stakeholders</i>	√		
	• Adanya upaya mengawasi keberlanjutan program	√		
	• Adanya pembaharuan terhadap evaluasi program	√		
6	Pelibatan Stakeholders		√	
	• Adanya mekanisme koordinasi dengan <i>stakeholders</i>	√		
	• Adanya mekanisme yang menjamin partisipasi <i>stakeholders</i> dalam evaluasi		√	
7	Keberlanjutan			√
	• Kesesuaian program dengan kebutuhan			√
	• Adanya progress program yang lebih baik			√
8	Hasil Nyata		√	
	• Adanya dampak nyata dari program		√	
	• Adanya manfaat nyata dari program		√	

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

Dari tabel disamping dapat disimpulkan dari beberapa indikator yang ada tersebut, yakni dari indikator Kepemimpinan (*Leadership*) dinilai terlaksana karena program kampung minapolitan ini mendapat dukungan dari pimpinan perusahaan dan juga pemerintah daerah, serta adanya kesadaran filantropi dari pimpinan perusahaan.

Pada indikator Proporsi Bantuan dikatakan kurang terlaksana dikarenakan dana CSR yang dikeluarkan oleh Perusahaan hanya untuk masyarakat yang memiliki komunitas atau kelompok masyarakat, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kelompok tidak mendapatkan bantuan CSR, serta dana CSR yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan pengajuan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas, dinilai kurang terlaksana karena Pelaporan untuk pelaksanaan Program Kampung Minapolitan ini tidak disampaikan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah, dan Laporan Tahunan untuk Kampung Minapolitan ini diperuntukkan untuk internal perusahaan, perusahaan akan memberikan laporan tersebut, apabila Pemerintah Daerah meminta laporan tersebut dengan terlebih dahulu melalui proses administrasi dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan, sampai saat ini laporan tersebut tidak ada tembusannya ke DPRD Kota Dumai dan masih berada di Internal Perusahaan.

Sedangkan, indikator cakupan wilayah dinilai terlaksana karena wilayah yang menerima program termasuk wilayah ring 1 dimana kawasan yang merupakan wilayah prioritas karena berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, untuk ketepatan program dirasakan tepat karena kelompok TUNA merasa terbantu dengan adanya program ini.

Indikator Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan evaluasi dinilai terlaksana, dikarenakan untuk pelaksanaan program CSR ini adanya koordinasi dengan pemerintah daerah berupa perizinan dan juga menggandeng Dinas terkait, serta adanya monitoring dari perusahaan dan Dinas setiap sebulan sekali, dan juga adanya evaluasi dari Internal perusahaan terhadap program yang dijalankan.

Sedangkan Pelibatan Stakeholder, dinilai kurang terlaksana dikarenakan dalam evaluasinya perusahaan tidak menerima saran dari Dinas Perikanan dan juga kelompok Nelayan TUNA untuk pelaksanaan program kedepannya, keputusan akhir untuk pelaksanaan program tergantung pada keputusan internal perusahaan.

Keberlanjutan, dinilai tidak terlaksana dikarenakan Kelompok Nelayan TUNA belum merasakan progres yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk pelaksanaan program ini, serta pemberian bantuan dari perusahaan tidak sesuai dengan permintaan masyarakat sehingga hasilnya tidak maksimal dan tidak berlanjut seperti budidaya ikan.

Indikator hasil nyata, kurang terlaksana karena meskipun tujuan dari program ini tidak tercapai namun Nelayan TUNA mendapatkan sebagian kecil untuk mendukung aktivitas melaut.

5.4 Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan dan Informan yang dilakukan oleh Peneliti ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) yakni sebagai berikut:

1. Tidak adanya peran Forum TJSP Kota Dumai dalam pelaksanaan Program CSR Perusahaan yakni Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas, hal tersebut terlihat dari ketidaktahuan Forum TJSP terhadap Program-program CSR yang dijalankan oleh Perusahaan, dikarenakan Forum TJSP Kota Dumai baru dibentuk pada Desember tahun 2020, akan tetapi Forum TJSP tidak berjalan sebagaimana mestinya, pada bulan juli 2021 Forum TJSP diperbaharui kepengurusnya, dan pembentukan ulang tersebut hanya memfokuskan pada pembangunan Dumai Islamic Center, sehingga dari awal pembentukan hingga saat ini Forum TJSP belum menjalankan tugas sesuai dengan TUPOKSI yang tertera dalam PERDA Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan TJSP.
2. Kurangnya komunikasi Perusahaan kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah tidak mengetahui sejauh mana Perusahaan sudah berkontribusi terhadap masyarakat disekitar perusahaan, hal ini terlihat dari Perusahaan tidak memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah, serta tidak adanya tembusan laporan yang disampaikan kepada DPRD Kota Dumai.

3. Tidak adanya transparansi terhadap potensi-potensi perusahaan yang dapat dan mampu mensejahterahkan masyarakat melalui program CSR , yang juga bahkan belum adanya aturan yang jelas tentang kemampuan tersebut yang masih elastis dan tidak terikat dengan jelas, sedangkan untuk menentukan kemampuan tersebut, dapat dilihat dari keuntungan perusahaan dan berapa persennya harus ditetapkan.
4. Masih kurangnya koordinasi lanjutan antara perusahaan dan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari ketidaktahuan Camat dan Lurah baru mengenai Program Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas, Serta tidak adanya pelibatan Camat dan Lurah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan Perusahaan
5. Masih kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Perusahaan dengan kelompok Nelayan TUNA sehingga menyebabkan kebutuhan serta harapan dari kelompok Nelayan TUNA tidak terpenuhi sepenuhnya dikarenakan terjadinya perbedaan keinginan antara perusahaan dan kelompok Nelayan TUNA.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang peneliti lakukan, maka pada bab ini Peneliti menyimpulkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas). Peneliti juga memberikan saran sebagai acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat bermanfaat dan memberikan fungsi akademis dan fungsi praktis bagi pemerintah. Semoga karya tulis yang peneliti buat ini menjadi bahan perubahan untuk keadaan yang lebih baik dalam pelaksanaan program CSR di Kelurahan Tanjung Palas.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan program *Corporate Social Responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap Kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program Pengembangan Kampung Minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) sudah **Kurang Terlaksana**. Untuk lebih jelasnya kesimpulan disajikan dalam beberapa indikator Pelaksanaan CSR menurut Kartini yang menjadi tolak ukur dalam penulisan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Pelaksanaan Program *corporate social responcibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan

kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas pada indikator kepemimpinan/*leadership* sudah **Terlaksana**.

2. Proporsi Bantuan

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Kurang Terlaksana**.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Kurang Terlaksana**.

4. Cakupan Wilayah

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Terlaksana**.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Terlaksana**.

6. Pelibatan Stakeholder

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Kurang Terlaksana**.

7. Keberlanjutan

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Tidak Terlaksana**.

8. Hasil Nyata

Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok nelayan TUNA yakni program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas dinilai **Kurang Terlaksana**.

9. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina RU II Dumai terhadap kelompok Nelayan TUNA (Studi Kasus Program pengembangan kampung minapolitan di Kelurahan Tanjung Palas) yaitu Forum TJSP Kota Dumai belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan PERDA Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan TJSP, masih kurangnya Komunikasi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah Kota Dumai sehingga Pemerintah Daerah tidak tahu sejauh mana kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat, PT Pertamina RU II Dumai tidak transparan terhadap potensi-potensi perusahaan, Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah, serta masih kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Perusahaan dengan kelompok sasaran.

6.2 Saran

1. Forum TJSP harus segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar program CSR yang dijalankan oleh Perusahaan lebih memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2. Pemerintah Daerah dan Perusahaan harus meningkatkan komunikasi dan bekerja sama dalam mendukung program CSR yang dijalankan agar Pemerintah Daerah juga mengetahui sejauh apa kontribusi Perusahaan kepada masyarakat di Sekitar wilayah operasi Perusahaan.
3. Perusahaan harus lebih transparan terhadap porsi bantuan yang seharusnya dikeluarkan setiap tahunnya untuk wilayah ring 1,2 dan 3 dan laporan tahunan dari pelaksanaan setiap program yang dilakukan agar pemerintah dapat menilai keberhasilan dari program yang dijalankan.
4. Perusahaan harus meningkatkan koordinasi lanjutan kepada pemerintah Daerah seperti Lurah dan Camat setelah pergantian Kepala Daerah agar Lurah dan Camat yang baru menjabat dapat mengetahui adanya program CSR tersebut diwilayah kerjanya.
5. Penyelenggara kegiatan CSR agar lebih memperhatikan dan teliti terhadap bantuan yang memang dibutuhkan masyarakat sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Penelitian Terdahulu :

- Ariana, P. (2018). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
- Asri, T. M., & Insari, F. F. (2020). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Program Bank Sampah Delima Pada Pt Pertamina Ep Asset 4 Field Cepu. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 309-332.
- Diayu Humairah, D. (2022). *Implementasi Corporate Social Responcibility (CSR) PT Pertamina Refinery Unit II pada Program Pertanian dan Perikanan Terpadu di Kelurahan Bukit Datuk Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hafis, Z. A. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Kartini, P. D. (2013). *Corporate Social Responcibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lestari, Y. S. F. (2019). *Implementasi Program Corporate Social Responcibility (CSR) PT. ASTRA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Komunitas (Studi Implementasi CSR PT. Astra di Desa Sukolilo Jabung Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Maksudi, B. I. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Meyzi Heriyanto, A. H. (2019). *Model Implementasi Program CSR di Indonesia Praktek di PT. Pertamina RU II Dumai dan PT. Chevron Pacifik Indonesia (CPI) Riau*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Moris Adidi Yogya, M. D. (2019). *Corporate Social Responcibility dan Ekologi Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Pasalong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- PRATIWI, R. N. (2020). *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Refinery Unit II Dumai dalam Mempertahankan Citra Perusahaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prof.Dr.Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat:eksploratif,enterpretif,interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2013). *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Jakarta: Jenderal.
- Suryani, R. A. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 85-106.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang Administasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wedayanti, M. D. (2018). *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Yohana, N. (2021). Model Manajemen Komunikasi Program Corporate Social Rspncibility (CSR) Kampung Gambut Berdikari PT. Pertamina RU II Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(2), 170-187.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., & Hasse, J. (2020). The Implementation Corporate Social Responsibility Factors That Affect the Corporate Political Activities in Riau Province. *ICoSEEH 2019*, 4, 390-394.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., & Jubba, H. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 59-76.
- Zaili Rusli, A. m. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Pekanbaru: Taman Karya.

Zulkifli., Awang, Azam., dkk, 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

